



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2017

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Alamat Kantor : Jl. Perwira No. 184 Kelurahan Belakang Balok Kota Bukittinggi.



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017 yang dalam laporan ini disebutkan sebagai LKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi 2017 merupakan suatu pertanggungjawaban formal Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai pengguna anggaran yang berkewajiban untuk menyampaikan laporan kinerjanya sesuai dengan amanat PP Nomor: 8 Tahun 2006. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai salah satu unit kerja eselon II berkewajiban menyusun LKIP tahun 2017 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dan atas penggunaan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama tahun 2016.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian kinerja yang termuat dalam laporan ini merupakan realisasi kinerja dari target-target kinerja yang telah diperjanjikan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja. Secara umum sasaran yang direncanakan tahun 2016 dapat dikatakan terealisasi dengan cukup baik.

Dapat tersusunnya LKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2017 ini dicapai karena adanya dukungan dari seluruh unit kerja yang ada. Meskipun demikian sebagian indikator kinerja lainnya masih perlu dukungan dan koordinasi yang lebih intens dengan unit kerja lainnya.

Akhir kata semoga LKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2017 ini dapat bermanfaat untuk menentukan arah kebijakan dan program serta kegiatan pada masa yang akan datang.

Bukittinggi, Februari 2018

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text "PEMERINTAH KOTA" at the top and "BUKITTINGGI" at the bottom, separated by two stars. The inner circle contains the acronym "DP3APKB". A handwritten signature in black ink is written across the stamp.

TATI YASMARNI, SE MM
NIP. 19630629 198302 2001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi tahun 2017 dimaksudkan untuk menginformasikan capaian kinerja tahun 2017 yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas P3APKB. Capaian kinerja ini menggunakan tolok ukur target kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2017 yang merupakan komitmen penuh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi disusun untuk menggambarkan capaian kinerja sampai tahun 2017. Sebagai materi utama dalam penyusunan LKIP ini adalah **Rencana Strategis (Renstra)** yang memuat Tujuan dan Sasaran yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan, **Rencana Kerja (Renja)** tahun 2017 dan **Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)** Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi tahun 2017

Analisis dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), ini digunakan untuk membuktikan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja (IK) Kepala Dinas Yang telah ditetapkan pada tahun 2017. Berikut adalah rincian dari Indikator Kinerja Utama (IK) yang telah dicapai :

Tabel 1.1
Capaian Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017			Sumber Data
			Target	Realisasi	Capaian	
1	Persentase Perempuan di Legislatif	Persentase	8 %	8%	100%	Dinas P3APKB

2	Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persentase	54,63%	54,63%	100%	BPS
3	Tingkat Capaian Kota Layak anak berdasarkan Kategori	Kategori	Pratama	Pratama	100%	Kementerian PPPA
4	Rasio kekerasan terhadap perempuan	Rasio	7,9	4,24	186,32	Dinas P3APPKB
5	Rasio kekerasan terhadap anak.	Rasio	13,09	13,09	100%	Dinas P3APPKB
6	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	Persentase	68%	63,79%	93,81 %	Dinas P3APPJB
7	Age Spesific Fertility Rates (ASFR)	Jumlah	96	96,04	100%	Dinas P3APPKB
8	Persentase dokumen kependudukan yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan.	Persentase	20%	20%	100%	Dinas P3APPKB

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan dan perbaikan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi kedepan, masih terdapat beberapa persoalan-persoalan di masyarakat yang belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik, sehubungan dengan hal tersebut pentingnya koordinasi dan sinergi antara berbagai unsur Instansi terkait ataupun mitra kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi .

Sebagai langkah nyata dari perbaikan berkelanjutan tersebut, pada tahun 2018 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi akan mempersiapkan SDM dan insfrastrukur untuk mendorong terwujudnya Visi dan Misi Walikota Bukittinggi yaitu ***Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan Kesehatan, Perdagangan dan Jasa Berlandaskan Nilai***

Agama dan Budaya dengan memperhatikan kondisi keadilan dan kesetaraan Gender serta program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Kota Bukittinggi.

Pada tahun 2017 ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi melaksanakan 12 program yang dijabarkan kedalam 62 (Enam puluh dua) kegiatan dengan alokasi anggaran Rp.7.324.933.013,-,- diantaranya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang KB sebesar Rp.2.526.124.161,-

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi telah mencapai kinerja yang baik.

1. Aspek Keuangan

Pada tahun anggaran 2017 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi dalam rangka pelaksanaan tugas operasional dan kegiatan pelayanan publik, didukung dengan alokasi Belanja Langsung Rp.7.324.933.013,00 dengan realisasi sebesar Rp.6.063.989.887,00 atau 82,79 %

Berbagai keberhasilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi sampai dengan bulan Desember 2017 telah dapat dilaksanakan dengan baik dan hambatan /masalah yang dihadapi telah dapat dicarikan solusi pemecahannya secara maksimal sesuai dengan kemampuan dan aturan yang berlaku.

Bukittinggi, Februari 2018

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi



TATI YASMARNI, SE MM
NIP. 19630629 198302 2 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif.....	iii
Daftar Isi	vi
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Data Umum SKPD.....	2
1.3 Landasan Hukum	4
1.4 Maksud dan Tujuan	5
1.5 Sistematika Penulisan	6
1.6 Tugas dan Wewenang Organisasi.....	7
1.7 Susunan Organisasi.....	7
1.8 Pegawai.....	9
Bab II Perencanaan Kinerja	13
2.1 Perencanaan Strategis Tahun 2017	13
2.2 Tujuan dan Dan Sasaran	14
2.3 Indikator Kinerja Utama Tahun 2017	16
Bab III Akuntabilitas Kinerja	18
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	18
3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis .	20
3.3 Akuntabilitas Keuangan	68
3.4 Permasalahan dalam Pencapaian dan Rekomendasi Perbaikan	73
3.5 Usulan dan Harapan.....	74
3.6 Prestasi dan Penghargaan.....	75
Bab IV Penutup	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sejalan dengan itu, dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, asas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas. Menurut penjelasan undang-undang tersebut, azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Bukittinggi dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Bukittinggi adalah sebagai sarana dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* atas pelaksanaan tugas,

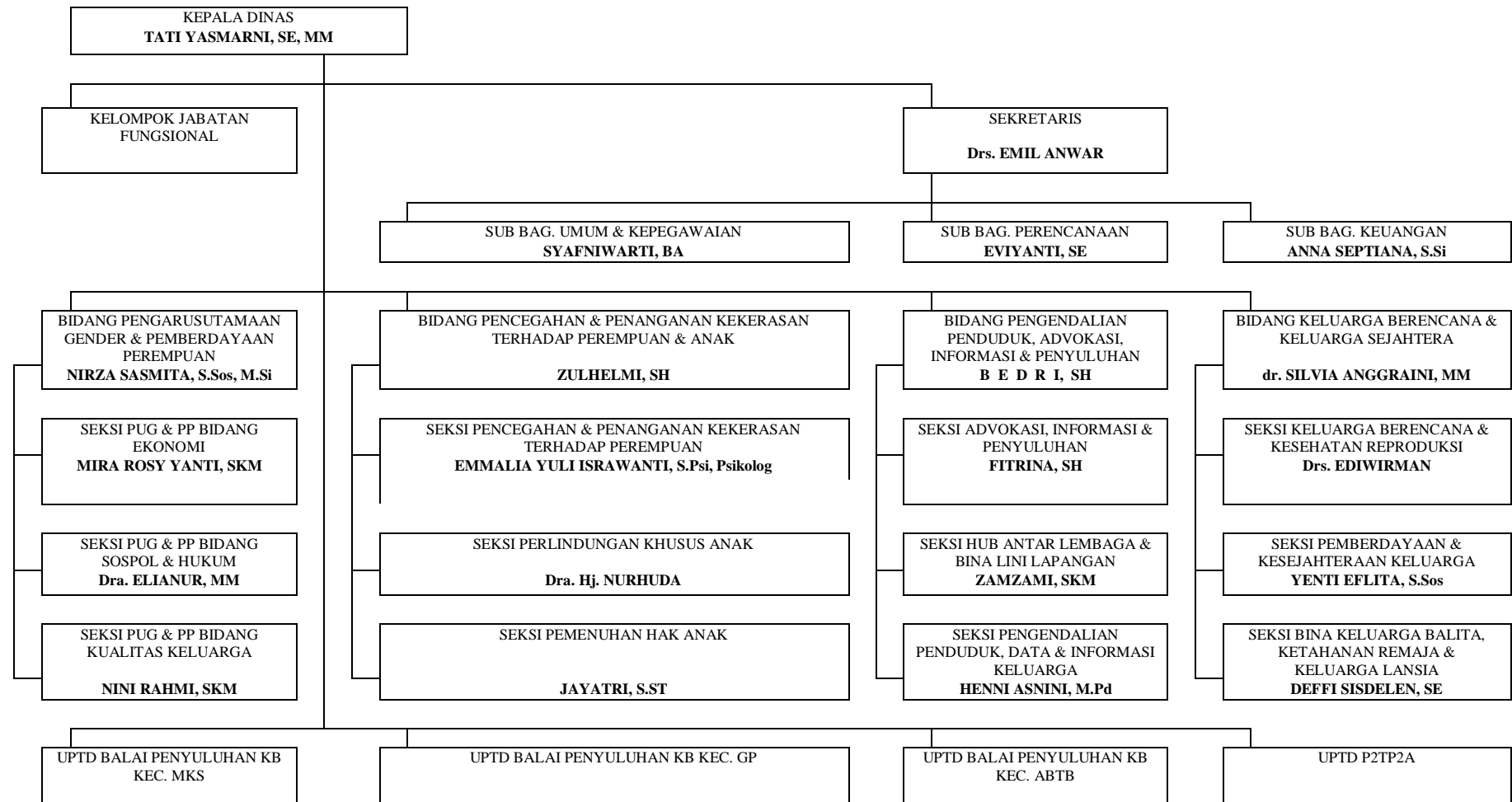
fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, LKIP diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka mendorong Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Kota Bukittinggi

1.2 Data Umum SKPD

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi adalah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dalam menjalankan kewenangan pemerintah daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dinas P3APKB dipimpin oleh Kepala Dinas, Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas P3APKB memiliki 11 (Sebelas) orang Penyuluh Keluarga Berencana, semua ASN berjumlah 47 (empat puluh tujuh) orang dan Pegawai Kontrak 3 (Tiga) orang yang merupakan pegawai yang dipekerjakan di Dinas P3APKB.

BAGAN STRUKTUR DINAS PPPAPKB



1.3 Landasan Hukum

Penyusunan LKIP Tahun 2017 tidak terlepas dari Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi yang telah disusun sebelumnya, mengingat LKIP merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja yang tersusun dalam RENJA yang telah dilaksanakan selama satu tahun penuh.

Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Berikut adalah landasan hukum dalam penyusunan LKIP Tahun 2017 :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan

rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;

7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun berdasarkan:

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bertanggung jawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan Visi dan Misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui kebijakan dan program yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan yang ditetapkan dalam APBD Kota Bukittinggi dan sumber dana lainnya (APBN, DAK Bidang KB) Tahun anggaran 2017 yang ditujukan kepada Walikota dan sebagai bahan dukungan untuk penyusunan LKIP Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017.

Tujuan LKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi Tahun 2017 secara umum adalah untuk menggambarkan tingkat capaian kinerja program dan kegiatan, permasalahan yang dihadapi dan langkah-langkah yang dilakukan.

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada dasarnya adalah penyampaian dan pengkomunikasian capaian kinerja pada urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tersebut akan menghasilkan keberhasilan berupa kesesuaian antara capaian kinerja dengan rencana kinerja. Ataupun menghasilkan ketidaksesuaian / kegagalan berupa sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) kinerja yang merupakan umpan balik (*Feed Back*) untuk perbaikan atas kekurangan / kelemahan pada masa yang datang. Penyajian LKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi sampai dengan Triwulan IV tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

Bab I : Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Data Umum SKPD
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Penulisan
- 1.6 Tugas dan Wewenang Organisasi
- 1.7 Susunan Organisasi
- 1.8 Pegawai

Bab II : Perencanaan Kinerja

- 2.1 Perencanaan Strategis 2017
- 2.2 Tujuan dan Sasaran

2.3 .Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

Bab III : Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

3.3 Akuntabilitas Keuangan

3.4 Permasalahan dalam Pencapaian dan Rekomendasi Perbaikan

3.5 Usulan dan Harapan

3.6 Prestasi dan Penghargaan

Bab IV : Penutup

1.6 Tugas dan Wewenang Organisasi

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi adalah sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dalam menjalankan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, adalah:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
2. Pemberian dukungan Program atas urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
3. Melaksanakan tugas di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.
4. Melaksanakan Komunikasi Informasi dan Edukasi tugas di bidang PP/PA dan KB/KS
5. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan pimpinan dengan tugas dan fungsinya.

1.7 Susunan Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi ditetapkan dengan peraturan Daerah 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- Kepala Dinas : 1 (satu) Orang
- Sekretaris : 1 (satu) Orang
- Kepala Bidang : 4 (empat) orang
 - Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
 - Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 - Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
 - Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Informasi dan Penyuluhan
- Kasubag : 3 (Tiga) Orang
 - Kasubag Umum Kepegawaian
 - Kasubag Keuangan
 - Kasubag Perencanaan
- Kepala Seksi : 12 (Dua Belas) Orang yaitu:
 - Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan
 - Seksi Perlindungan Khusus Anak
 - Seksi Pemenuhan Hak Anak
 - Seksi PUG dan Bidang Ekonomi
 - Seksi PUG dan PP Bidang SosPol dan Hukum
 - Seksi PUG dan PP Bidang Kualitas Keluarga
 - Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
 - Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
 - Seksi Bina Keluarga Balita, Ketahanan Remaja dan Keluarga Lansia
 - Seksi Advokasi, Informasi dan Penyuluhan
 - Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Bina Lini Lapangan
 - Seksi Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi Keluarga
- Kelompok Fungsional : 11 (Sebelas) Orang
- Staf : 15 (lima belas) Orang

1.8 Pegawai

Jumlah sumber Daya Aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi keadaan 31 Desember 2017 adalah sebanyak 47 (Empat Puluh Tujuh) orang sbb :

No	Nama/NIP	Pangkat/ Gol TMT	Jabatan	Pendidikan
1.	TATI YASMARNI, SE, MM NIP. 19630629 198302 2 001 Matur, 20 Juni 1963	IV /b	KEPALA Dinas	S2 MANAJEMEN PEMASARAN
2.	Drs. EMIL ANWAR NIP. 19640614 199203 1009 Bukittinggi, 14 Juni 1964	IV/a	SEKRETARIS Dinas	S1 Psikologi Pendidikan dan Bimbingan
3.	NIRZASASMITA, S.Sos, M.Si NIP. 19670918 198903 2 004 Agam, 18 Sept 1967	IV/a	Kabid Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	S2 Manajemen
4.	ZULHELMI, SH NIP. 19660527 199103 2 004 Bukittinggi, 27 Mai 1966	IV/a	Kabid Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	S1 Hukum
5.	dr. SILVIA ANGRAINI, MM NIP. 19701231 200212 2 020 Kubang Putih, 31 Des 1970	IV/a	Kabid Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	S1 Kedokteran Umum
6.	BEDRI, SH NIP. 19670427 199312 2 001 Dumai, 27 April 1967	IV/a	Kabid Pengendalian Penduduk, Advokasi, Informasi dan Penyuluhan	S1 Hukum Perdata
7	SYAFNIWARTI, BA NIP. 19600802 198101 2 001 Padang, 2 Agustus 1960	III/d	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	D3 Bahasa Inggris
8	ANNA SEPTIANA, S.Si Nip. 19700913 200212 2 001 Jakarta, 13 september 1970	III/c	Kasubbag Keuangan	SI PROGRAM BIOLOGI
9.	EVIYANTI, SE NIP. 19771111 200212 2 003 Jambak, 11 November 1977	III/c	Kasubbag Perencanaan	S1 Ekonomi
10.	Dra. ELIANUR, MM NIP. 19660322 199203 2 007 Padang Pjg, 22 Mrt 1966	IV/a	Kasi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum	S2 Manajemen

11.	NINI RAHMI, SKM NIP.19710428 199403 2 003 Agam,28 April 1971	III/d	Kasi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga	S 1 Kemasyarakatan
12.	MIRA ROSY YANTI, SKM NIP. 19751004 200901 2 001 Bukittinggi, 4 Oktober 1975	III/b	Kasi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi	S 1 Kemasyarakatan
13.	Dra. NURHUDA Nip. 19650813 199303 2 001 Bukittinggi, 13 agustus 1965	III/d		S1 SOSIAL ANTROPOLOGI
14.	JAYATRI, S.ST NIP. 19710418 199012 2 001 Dangung-dangung, 18 April 1971	III/d	Kasi Pemenuhan Hak Anak	D IV Kebidanan
15.	EMMALIA YULI ISRAWATI,S.Pi NIP.197707142006042005 Malang,14 Juli 1977	III/c	Kasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Psikologi Profesi
16.	Drs. EDIWIRMAN NIP. 19650709 199312 1 001 Candung, 9 Juli 1965	IV/a.	Kasi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Sarjana Pendidikan
17.	DEFFI SISDELEN, SE Nip. 19860208 200802 2 001 Bukittinggi, 8 Februari 1986	III/c	Kasi Bina Keluarga Balita Ketahanan Remaja Dan Keluarga Lansia	S1 AKUNTANSI
18.	YENTI EFLITA, S.Sos NIP. 19750927 200212 2 007 Batu Balabuh II,27 April 1975	III/c	Kasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Ilmu Administrasi Negara
19.	ZAMZAMI, SKM NIP. 19650417 198903 1 006 Padang,17 April 1965	III/d	Kasi Hubungan Antar Lembaga dan Bina Lini Lapangan	S 1 Kemasyarakatan
20.	HENNY ASNAINI,Spd.Mpd Nip 196404121985032007 Medan,12 April 1964	IV/a	Kasi Pengendalian Penduduk,Data Dan Informasi Keluarga	Administrasi Pendidikan
21.	FITRINA, SH NIP. 19650128 198603 2 007 SAPAT,28 Jan 1965	III/d	Kasi Advokasi, Komunikasi Informasi, Edukasi dan Penggerakan	Hukum
22.	Drs.MUL AKHIAR NIP.196411111992031001 Batu Palano,11 Nov 1964	III/d	Staf Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Bina Lini Lapangan	S 1
23.	EDWARD SONI,SS NIP.197511252006041006 Bukittinggi,25 Nov 1975		Kasi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi	
24.	NILVA WILDA Nip. 19710605 199101 2 001 Kampung Dalam, 5 juni 1971	III/c	Staf Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Bina Lini Lapangan	DIII ILMU KEBIDANAN

25.	YENDRIAN NIKE, SE NIP. 19860415 200501 2 002 Pasaman, 15 April 1986	III/a	Staf Subbag Umum Dan Kepegawaian	Ekonomi Manajemen
26.	YULIA FITRI, A.Md. Kep NIP. 19810720 200604 2 005 Padang, 20 Juli 1981	III/b	Staf Seksi Pemenuhan Hak Anak	Keperawatan
27.	IKE JUWITA, S.ST NIP. 19810720 200604 2 004 Bukittinggi, 30 September 1972	III/a	Staf Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Bidan Pendidik/DIV
28.	FATMA ANDRIYANI, Amd.Keb Nip. 19840123 200803 2 001 Lawang, 23 Januari 1984	II/d	Bendahara	DIII KEBIDANAN
29.	MARINA DWI NOVA, Amd.Keb Nip. 1918401 6200604 2 009 Bukittinggi, 16 maret 1984	III/a	STAF Seksi Pengendalian Penduduk, Data Dan Informasi Keluarga	DIII ILMU KEBIDANAN
30.	DEDI ANTONAS Nip. 19630516 198503 1 004 Payakumbuh, 16 mey 1963	III/b	Staf Umum dan Keuangan	SMA IPA
31.	WINNOF HARDIN Nip. 19621128 198503 1 005 Sei.penuh, 28 Nov 1962	III/b	STAF Seksi Advokasi, Komunikasi Informasi, Edukasi dan Penggerakan	SMA IPA
32.	RUSTAM Nip. 19670603 198903 1 003 Bukittinggi, 3 juni 1967	III/b	Staf Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	KPAA ADM PERKANTORAN
33.	FETRIA INTANIA, Amd.Keb Nip. 19850227 201101 2 006 Bukittinggi, 27 Februari 1979	II/d	STAF Keuangan	KEBIDANAN
34.	ZUZI YULIA, Amd.Keb NIP. 19760617 200604 1 008 Pakan Kamis, 17 Juni 1976	II/d	Staf KB/KS	DIII/Kebidanan
35.	TATIK SAPUTRI, A.Md Nip. 19840623 201001 2020 Bukittinggi, 23 juni 1984	II/d	STAF Umum Kepegawaian	DIII AKUNTANSI
36.	SITI INDONES, A.Md.Keb. NIP. 19750213 200604 2 007 Durian Tinggi, 13 Februari 1975	II/d	STAF Perencanaan	DIII KEBIDANAN
37.	ERIZON Nip. 19689618 1990 1 002 Tikam Agam, 18 Juni 1968	III/d	PLKB Kec.MKS	SMEA ADM PERKANTORAN
38.	ASNITA, SH Nip. 19610921 198903 2 002 Padang, 21 Sep 1961	IV/a	PLKB Kec.MKS	SI HUKUM PERDATA
39.	JASMIDAR Nip. 19641211 198603 2 009 Bukittinggi, 11 Des 1964	III/d	PLKB Kec.MKS	SMEA TATA BOGA
40.	SUSI RISMA SIMATUPANG, SH Nip. 19591005 198401 2 001 Sibolga, 5 Okt 1959	IV/a	PLKB Kec.ABTB	SI HUKUM PERDATA
41.	DARNNETI Nip. 1960010013 198401 2 001 Pekanbaru, 13 Jan 1960	III/d	PLKB Kec.ABTB	SMEA TATA NIAGA

42.	RIZA YUSMAITA Nip. 19670501 198803 2 005 Pkn Sinayan, 1 Mei 1967	III/d	PLKB Kec.ABTB	SPK BIDAN
43.	NELMAWATI, SH Nip. 19641020 199312 2 001 Batusangkar, 20 okt 1964	IV/a	PLKB Kec.MKS	SI HUKUM PERDATA EKONOMI
44.	MARDATILAH, SE Nip. 19630822 199203 2 005 Pekan Sinayan, 22 Agus 1963	IV/a	PLKB Kec.GP	SI EKONOMI MANAJEMEN
45.	NURJASMA, S.Sos Nip.19581026 198902 2 001 Bukittinggi, 26 Okt 1958	IV/a	PLKB Kec.GP	SI SOSIAL ADM NEGARA
46.	YULTI, A.Md Nip. 19630808 198903 2 005 Pasir, 8 Agus 1963	III/d	PLKB Kec. GUGUK PANJANG	DIII KOMUNIKASI PENYULUH
47.	YUDO TRINANDO Nip. 19780216 200604 1 008 Bukittinggi, 16 Feb 1978	II/c	Staf Datin	SMU IPS

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis Tahun 2017

Untuk mengukur kinerja diperlukan perencanaan kinerja. Sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diperlukan perumusan, suatu perencanaan Kinerja yang disusun selaras dengan perencanaan, jangka panjang (strategis), perencanaan jangka menengah, dan jangka pendek (taktis).

Keseluruhan perencanaan tersebut (strategis, jangka menengah, dan taktis) mesti jelas panduan arah yang akan dituju dan dalam setiap tahapan kegiatan mesti terukur capaian kinerjanya. Dan juga penting untuk diperhatikan adalah ketersediaan sumber daya manusia dan sumber daya lain sebagai perangkat utama yang akan menjalankan proses perencanaan strategis kedepan.

Dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada yang mungkin timbul, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai tugas pokok dan fungsinya telah menetapkan Perencanaan Kinerja yang berorientasi hasil yang ingin dicapai dalam 5 tahun ke depan. Perencanaan Kinerja tersebut meliputi penetapan **Tujuan dan Sasaran, serta cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran.**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dalam tahun 2017 telah ditetapkan rencana strategis dan target kinerja.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), bahwa Pemerintah Kota Bukittinggi sudah menetapkan Visi pembangunan yaitu; “*Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa Berlandaskan Nilai-Nilai Agama dan Budaya*”. Sedangkan Visi tersebut dituangkan kedalam 4 (empat) Misi, dimana Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengacu pada misi 5 yaitu :

MISI 5

Meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta kesejahteraan sosial masyarakat

2.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan didasarkan pada isu dan analisis strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan Kota Bukittinggi.

Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut :

Terwujudnya Keadilan dan kesetaraan gender

Terkendalinya Jumlah Peduduk

Pada tabel berikut dapat dilihat matriks hubungan antara tujuan. dan sasaran yang hendak dicapai. Dimana dalam setiap tujuan memiliki indikator sebagai alat ukur atas tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Tabel 2.1
Matriks Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	2	3	4
1	Terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender.	1. Meningkatnya peran serta perempuan dan anak dalam pembangunan.	a. Persentase Perempuan di Lembaga Legislatif.
			b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
			c. Tingkat Capaian Kota Layak Anak berdasarkan kategori.
		2. Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak.	a. Rasio Kekerasan terhadap perempuan. b. Rasio kekerasan terhadap Anak.
2	Terkendalinya Jumlah penduduk	1. Meningkatnya kualitas Program Keluarga Berencana.	a. Contraceptive Prevalence Rate (CPR). b. Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rates /ASFR 15-19).
		2. Meningkatnya kualitas kebijakan Pengendalian Penduduk.	Persentase dokumen kependudukan yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan.

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017

Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas tata pemerintahan, dilakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Tahun 2017
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2017
1	Meningkatnya peran serta perempuan dan anak dalam pembangunan.	Persentase Perempuan di Legislatif	Persentase	8 %
		Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persentase	54,63%
		Tingkat Capaian Kota Layak anak berdasarkan Kategori	Kategori	Pratama
2	Meningkatnya kualitas Program Keluarga Berencana	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	Persentase	68%
		Age Spesific Fertility Rates (ASFR)	Jumlah	96

2.4 Target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang harus dilaksanakan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan

untuk dihasilkan. Perjanjian Kinerja berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang akan dibiayai dari sumber dana yang terbatas sehingga diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola Program atau Kegiatan Instansi dan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi Tahun 2017 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kerja Tahun 2017 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi telah menetapkan Perjanjian kinerja sbb:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2017

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya peran serta perempuan dan anak dalam pembangunan.	Persentase Perempuan di Legislatif	8 %
		Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan	54,63%
		Tingkat Capaian Kota Layak anak berdasarkan Kategori.	Pratama
2	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan	7,9
		Rasio kekerasan terhadap anak.	13,09
3	Meningkatnya kualitas Program Keluarga Berencana.	Contraceptive Prevalence Rate (CPR).	68%
		Age Spesific Fertility Rates (ASFR)	96
4	Meningkatnya kualitas kebijakan Pengendalian Penduduk.	Persentase dokumen kependudukan yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan.	20%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



kuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kota Bukittinggi merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja selama tahun 2017 yang memuat Realisasi Kinerja dan capaian kinerja atas target-target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2017.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kota Bukittinggi selaku pengemban amanah dalam mendukung visi dan misi Walikota Bukittinggi telah melaksanakan kewajiban dan berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kota Bukittinggi sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam PERPRES Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Revisi Tahun 2016-2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka

mewujudkan Visi dan Misi serta tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pencapaian masing-masing sasaran terhadap target yang ditetapkan pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2017

No	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN				CAPAIAN	Sumber Data
			URAIAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI		
1.	Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Meningkatnya peran serta Perempuan dan Anak dalam pembangunan.	Persentase Perempuan di Legislatif	8 %	8%	100%	Dinas P3APKB
				Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan	54,63%	54,63%	100%	BPS
				Tingkat Capaian Kota Layak anak berdasarkan Kategori	Pratama	Pratama	100%	Kementerian PPPA
			Meningkatnya Perlindungan perempuan dan anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan	7,9	4,24	186,32	Dinas P3APKB
				Rasio kekerasan terhadap anak.	13,09	13,09	100%	Dinas P3APKB
2	Terkendalinya Jumlah penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	Meningkatnya kualitas program Keluarga Berencana	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	68%	63,79%	93,81 %	Dinas P3APPJB
				Age Spesific Fertility Rates (ASFR)	96	96,04	100%	Dinas P3APKB
			Meningkatnya kualitas kebijakan Pengendalian Pendudukan	Persentase dokumen kependudukan yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan.	20%	20%	100%	Dinas P3APKB

Dari Tabel 3.1 diatas dapat diketahui bahwa dari 8 Indikator Kinerja Sasaran 7 indikator tercapai 100 % ,dan 1 indikator lagi dibawah 100 % .

3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

Pengukuran kinerja sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis revisi tahun 2016 – 2021 maupun dalam Renja Perubahan tahun 2017.

Pelaporan kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017 dan Indikator Kinerja (IK) yang telah ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis dengan 8 (delapan) indikator sasaran dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

SASARAN	URAIAN	INDIKATOR
1	2	3
SASARAN 1	Meningkatnya Peran serta Perempuan dan Anak dalam Pembangunan.	1. Persentase Perempuan di Legislatif.
		2. Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan.
		3. Tingkat Capaian Kota Layak anak berdasarkan Kategori
SASARAN 2	Meningkatnya Perlindungan perempuan dan anak	1. Rasio kekerasan terhadap perempuan.
		2. Rasio kekerasan terhadap anak.

SASARAN 3	Meningkatnya kualitas program Keluarga Berencana	1. Contraceptive Prevalence Rate (CPR).
		2. Age Spesific Fertility Rates (ASFR).
SASARAN 4	Meningkatnya kualitas kebijakan Pengendalian Pendudukan	1. Persentase dokumen kependudukan yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan.

Setelah dilakukan pengukuran capaian kinerja pada setiap indikator sasaran yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja, maka perlu dilakukan evaluasi dan analisis. Evaluasi merupakan perbandingan data hasil pengukuran yang diperoleh (realisasi) dengan beberapa data pembanding. Evaluasi pada Laporan ini akan dilakukan perbandingan data sebagai berikut :

1. Nilai realisasi dengan target tahun 2017;
2. Nilai realisasi tahun 2017 dengan target akhir Renstra;
3. Nilai realisasi tahun 2017 dengan realisasi pada tahun 2016,
4. Faktor penghambat, dan faktor pendukung.

Sedangkan analisis merupakan bentuk pengeksploasian data hasil pengukuran yang diperoleh, dari eksplorasi data tersebut maka akan dapat diketahui beberapa hal penyebab munculnya nilai suatu data hasil pengukuran dan klasifikasi dari munculnya data itu sendiri.

Dengan dilakukannya analisis dan evaluasi terhadap data hasil pengukuran yang diperoleh, maka akan diperoleh solusi dan dapat dilakukan rekomendasi. Solusi muncul karena diketahuinya faktor-faktor pendorong dan faktor-faktor penghambat capaian kinerja suatu indikator sasaran. Dengan adanya solusi maka dapat diberikan rekomendasi yang dapat digunakan menjadi Rencana Aksi sebagai langkah awal perencanaan perbaikan pelaksanaan program atau kegiatan pada tahun-tahun berikutnya.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2017 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran,

sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan Kota Bukittinggi Tahun 2016- 2021. Analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut

Sasaran 1 Meningkatnya Peran serta Perempuan dan Anak dalam Pembangunan

Untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Peran serta Perempuan dan Anak dalam pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.1.1

Analisis Pencapaian Sasaran
antara target dengan realisasi kinerja tahun 2017
Meningkatnya Kualitas Perempuan dan Anak

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2017			Skala Nilai
					Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender	1. Meningkatnya Peran serta Perempuan dan Anak dalam Pembangunan.	Persentase Perempuan di Legislatif	%	8%	8%	100%	Sesuai target
			Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan		54,63%	54,63%	100%	Sesuai target
			Tingkat Capaian Kota Layak anak berdasarkan Kategori	Kategori	Pratama	Pratama	100%	Sesuai target

Sasaran meningkatkan Meningkatnya Peran serta Perempuan dan Anak dalam pembangunan diukur dengan indikator yaitu :

1. Persentase Perempuan di Legislatif

Keterwakilan perempuan dalam parlemen di Kota Bukittinggi masih rendah, hasil Pemilu tahun 2014 mencatat 2 orang perempuan yang duduk di DPRD Kota Bukittinggi dari 25 orang anggota (8%), menurun dari Pemilu lima tahun sebelumnya yaitu 4 orang perempuan yang duduk di DPRD (16%). Nilai ini masih dibawah kuota yang diatur dalam UU No.12 Tahun 2003, yang menyebutkan bahwa kuota perempuan untuk dapat berpartisipasi dalam politik sekitar 30 persen. Rendahnya partisipasi perempuan ini disebabkan karena banyaknya kendala yang menghambat perempuan untuk maju berpartisipasi dalam lembaga legislatif, diantaranya kendala psikologis, ekonomi, politik, dan sosial budaya.

Persentase Perempuan di legislatif diperoleh dengan membandingkan antara jumlah perempuan yang duduk di legislatif dengan jumlah total anggota legislatif :

$$\frac{\text{Jumlah Perempuan di legislatif}}{\text{Jumlah anggota legislatif}} \times 100 = \frac{2}{25} \times 100 = 8\%$$

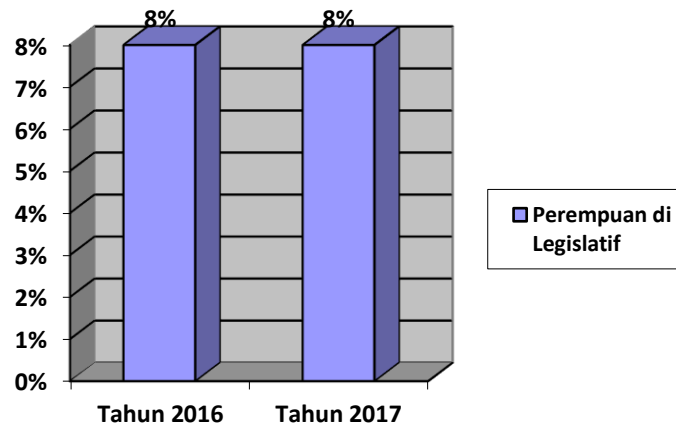
Tabel 3.2.1.2

Analisis Perbandingan realisasi kinerja tahun 2016 dengan 2017
Indikator Sasaran Persentase Perempuan di Legislatif

No.	Uraian	Tahun 2016			Tahun 2017		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Perempuan di legislatif	8%	8%	100%	8%	8%	100%

Gambar 3.2.1.1

Persentase Perempuan di legislatif Tahun 2016 s/d 2017



Partisipasi perempuan di legislatif pada tahun 2017 masih sama dengan tahun 2016 karena memang Pemilihan Umum yang dilaksanakan 1 kali dalam 5 tahun yaitu pada tahun 2015.

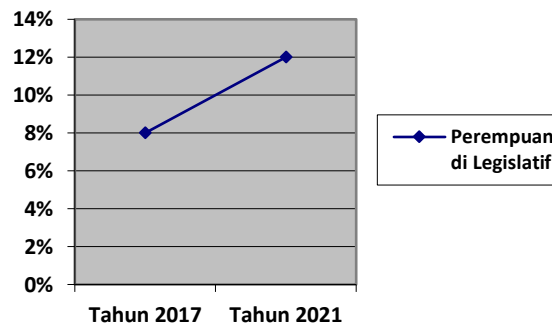
Tabel 3.2.1.3

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

No	Uraian	Realisasi tahun 2017	Target Renstra (2021)	Capaian terhadap Renstra
1.	Persentase Perempuan di legislatif	8%	12%	66,67%

Gambar 3.2.1.2

Perempuan di legislatif Tahun 2017 dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra Tahun 2021



Jika dibandingkan partisipasi perempuan legislatif tahun 2017 terhadap target jangka menengah tahun 2021 tercapai 66. 67% , maka untuk meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik kedepannya akan dilakukan pembinaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia serta memberikan affirmative action kepada perempuan untuk menduduki profesi tertentu atau terlibat dalam politik dan pengambilan keputusan. Untuk itu, diperlukan upaya lebih serius dan berkesinambungan dalam mewujudkan persamaan status dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan melalui berbagai program pembangunan.

Tabel 3.2.1.4

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2017 dengan standar nasional

No	Uraian	Realisasi tahun 2017	Standar Nasional
1.	Persentase Perempuan di legislatif	8%	30%

Sesuai dengan UU No.12 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa kuota perempuan untuk dapat berpartisipasi dalam politik sebesar 30 persen. Keterwakilan perempuan dalam parlemen di Kota Bukittinggi masih rendah, hasil Pemilu tahun 2014 mencatat 2 orang perempuan yang duduk di DPRD Kota Bukittinggi dari 25 orang anggota (8%). Rendahnya partisipasi perempuan ini disebabkan karena banyaknya kendala yang menghambat perempuan untuk maju berpartisipasi dalam lembaga legislatif, diantaranya kendala psikologis, ekonomi, politik, dan sosial budaya.

Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

Keterwakilan perempuan dalam pemilu dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal

Faktor internalnya adalah :

- Perempuan tidak tertarik terjun ke dunia politik, karena budaya setempat yang tidak mendukung.
- Peran domestik perempuan yang seringkali tidak bisa diabaikan
- Keterbatasan akses kapital untuk mendukung aktivitas perempuan di parpol.

Faktor eksternalnya adalah :

- Parpol belum membuka secara luas kesempatan bagi perempuan untuk duduk di posisi strategis di level pengambilan keputusan/kebijakan parpol.
- Proses pengambilan dan produk kebijakan parpol sering mengabaikan kepentingan perempuan atau tidak sensitif/responsif gender.
- Dukungan keluarga dan masyarakat terhadap keterlibatan perempuan di politik sangat minim

Untuk meningkatkan capaian partisipasi perempuan di lembaga legislative dibutuhkan dukungan sumber daya manusia yang lebih professional.

2. Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK) adalah Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi dilihat dari proporsi penduduk yang masuk kedalam pasar kerja (bekerja maupun mencari pekerjaan). Semakin tinggi TPAK menunjukkan sebagian besar bagian dari penduduk usia kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK) diperoleh dengan membandingkan antara Proporsi Penduduk Angkatan Kerja dengan Penduduk usia kerja :

$$\frac{\text{Proporsi penduduk angkatan kerja}}{\text{penduduk usia kerja}} \times 100 = \frac{26.384}{48.249} \times 100 = 54,63\%$$

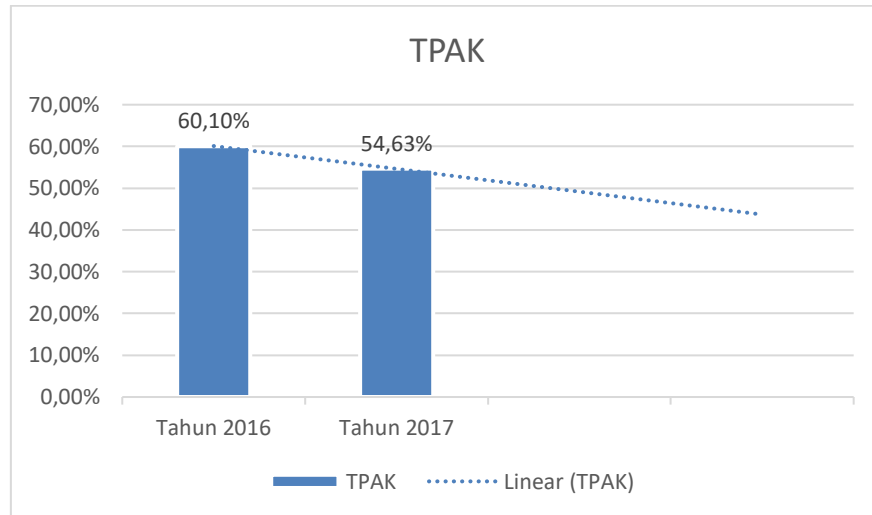
Tabel 3.2.1.5

Analisis Perbandingan realisasi kinerja tahun 2016 dengan 2017
Indikator Sasaran Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan

No.	Uraian	Tahun 2016			Tahun 2017		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan	54%	60,10%	111,30%	54,63%	54,63%	100%

Gambar 3.2.1.3

Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan
Tahun 2016 s/d 2017



Jika dibandingkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan pada tahun 2017 lebih rendah dari pada tahun 2016 karena perempuan usia kerja lebih cenderung mengurus rumah tangga

Tabel 3.2.1.6

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

No	Uraian	Realisasi tahun 2017	Target Renstra (2021)	Capaian terhadap Renstra
1.	Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan	54,63%	%	%

Tabel 3.2.1.7

**Data Angkatan Kerja dan bukan angkatan kerja Kota Bukittinggi
Tahun 2017**

No	Kegiatan Utama	Lak-laki	Perempuan	LK +PR
I	Angkatan Kerja	33.922	26.384	60.306
	1. Bekerja	31.530	24.591	56.121
	2. Pengangguran	2.392	1.793	4.185
II	Bukan Angkatan Kerja	10.286	21 865	32.151
	1. Sekolah	5.816	8.935	14.751
	2. Mengurus rumah tangga	1.622	11.569	13.191
	3. Lainnya	2.848	1.361	4.209
III. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		76,73	54,63	65,23
IV. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		7,05	6,80	6,94

Sumber BPS kota bukittinggi th 2017, Hasil Sarkernas 2017

Tabel 3.2.1.8

**Data Angkatan Kerja dan bukan angkatan kerja Kota Bukittinggi
Tahun 2016**

No	Kegiatan Utama	Lak-laki	Perempuan	LK +PR
I	Angkatan Kerja	32 151	27.956	60.107
	3. Bekerja	30 475	26 003	56.478
	4. Pengangguran	1.676	1.953	3629
II	Bukan Angkatan Kerja	10.258	18558	28 816
	1. Sekolah	4458	5.193	9651
	2. Mengurus rumah tangga	1.218	11.149	12.367
	3. Lainnya	4582	2216	67989
III. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		75,81	60.10	67,59

Sumber BPS kota bukittinggi th 2016, Hasil Sarkernas 2016

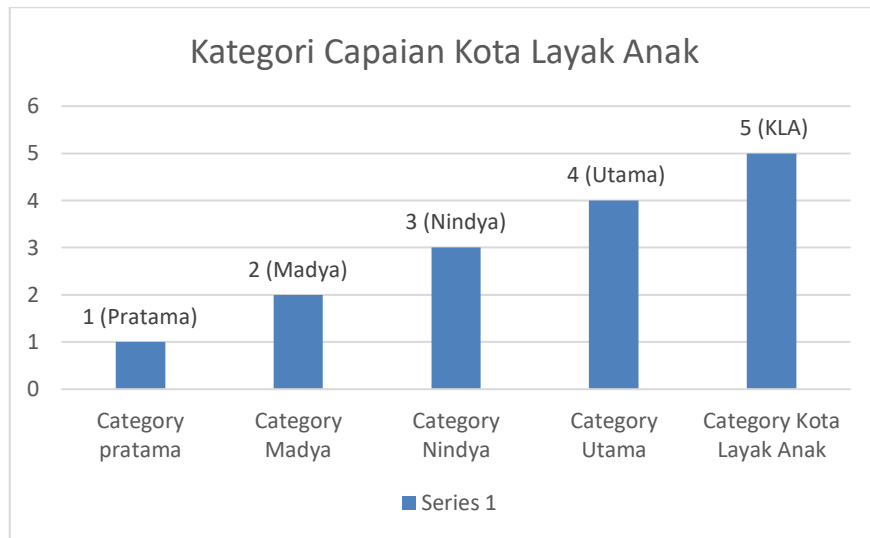
Jika dibandingkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan pada tahun 2016 dengan tahun 2017, terjadi penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dari 60,10 % menjadi 54,63 % sedangkan laki-laki meningkat dari 75,81 % di tahun 2016 menjadi 76,73% di tahun 2017. Hal ini menunjukkan keterlibatan perempuan pada kegiatan ekonomi (pasar kerja) lebih rendah dari pada laki-laki. TPAK laki-laki sebesar 76,73 persen sedangkan perempuan sebesar 54,63 persen.

3. Tingkat Capaian Kota Layak anak berdasarkan Kategori

Kota Layak Anak (KLA) yaitu pemerintah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin “pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak”. Yang diukur melalui 24 Indikator yang mencerminkan pemenuhan hak dan perlindungan anak dari aspek kelembagaan dan 5 (lima) klaster substansi Konvensi Hak Anak (KHA). Dengan kategori :

- Pratama;
- Madya;
- Nindya;
- Utama dan ;
- Kota Layak Anak (KLA).

Gambar 3.2.1.4
Tingkat Capaian Kota Layak Anak berdasarkan Kategori



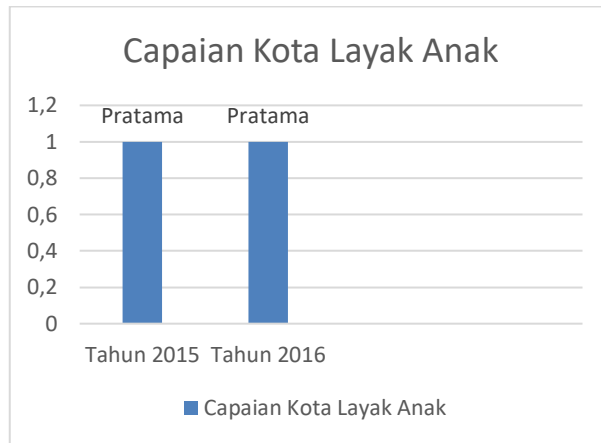
Tabel 3.2.1.9

Analisis Perbandingan realisasi kinerja tahun 2015 dengan 2017
Indikator Sasaran Capaian Kota layak anak berdasarkan kategori

No.	Uraian	Tahun 2015			Tahun 2017		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Capaian Kota Layak anak berdasarkan kategori	Pratama	Pratama	100%	Pratama	Pratama	100%

Gambar 3.2.1.5

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2015 dengan 2017
Indikator Sasaran Capaian Kota layak anak berdasarkan kategori



Sebagai komitmen Pemerintah Kota Bukittinggi dalam pemenuhan hak anak, pemerintah Kota Bukittinggi telah melaksanakan Launching Kota Layak Anak pada tanggal 4 Mei 2015. Pada tahun 2015 ini untuk pertama kalinya Kota Bukittinggi memperoleh penghargaan Kota Layak Anak dengan Kategori Pratama oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pada tahun 2017 dilakukan lagi Penilaian Kota Layak Anak dengan system penilaian berbasis Website, dengan hasil Kota Bukittinggi memperoleh Kota Layak Anak kategori Pratama (sama seperti tahun 2015). Sementara Pada Tahun 2016 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak melakukan penilaian Kota Layak Anak. Namun mulai pada tahun 2017 ini Kementerian PPPA berkomitmen untuk melakukan penilaian Kota Layak Anak setiap tahunnya.

Tabel 3.2.1.10

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

No	Uraian	Realisasi tahun 2017	Target Renstra (2021)	Capaian terhadap Renstra
1.	Capaian Kota Layak anak berdasarkan kategori	Pratama	Madya	50%

Setelah dua kali dilakukan evaluasi Kota Layak Anak (KLA) Kota Bukittinggi mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak Kategori Pratama artinya selama dua kali penilaian ini kategori kota layak anak ini belum mengalami peningkatan menjadi Madya. Target Capaian Kota Layak Anak pada tahun 2021 adalah Madya untuk itu diperlukan koordinasi yang lebih baik dan terintegrasi serta komitmen dari semua pihak yang terkait sehingga diharapkan kota Bukittinggi dapat menuju kota layak anak dengan tingkat yang lebih baik.

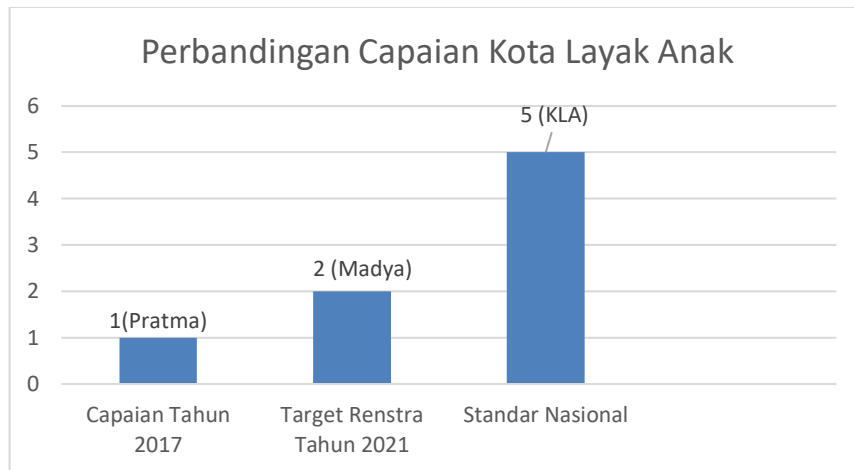
Tabel 3.2.1.11

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2017 dengan standar nasional

No	Uraian	Realisasi tahun 2017	Standar Nasional
1.	Capaian Kota Layak anak berdasarkan kategori	Pratama	Kota Layak Anak

Gambar 3.2.1.6

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2017 dengan target Renstra Tahun 2021 dan standar Nasional
Indikator Sasaran Capaian Kota layak anak berdasarkan kategori



Capaian Kota Layak Anak pada tahun 2015 dan tahun 2017 masih di tahap dasar yaitu Pratama. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

1) Kelembagaan

Kota Bukittinggi belum mempunyai Perda Kota Layak Anak yang mengatur hak anak yang ada pada 5 klaster.

2) Klaster I (Hak Sipil dan Kebebasan)

Anak belum di ikutkan dalam Musrenbang di kelurahan sehingga hak anak untuk berpartisipasi dalam pembangunan belum terpenuhi.

3) Klaster II (Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif)

Masih ada perkawinan anak tahun 2016 sebanyak 140 orang Tahun 2017 sebanyak 114 orang.

Infrastruktur ramah anak yang masih kurang (belum ada Ruang Bermain Ramah Anak yang sesuai standar di Kota Bukittinggi).

4) Klaster III (Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan)

Tahun 2016: Data Kematian Bayi 12 orang, Kematian Ibu Melahirkan 3 orang, prevalansi Balita Gizi Kurang 19,7 %, Prevalansi Balita Pendek Kurus 38 %)

Tahun 2017: Data Kematian Bayi 7 orang, Kematian Ibu Melahirkan 1 orang, prevalansi Balita Gizi Kurang 9 %, Prevalansi Balita Pendek 13,2%) walaupun sudah ada penurunan dari tahun 2016 ke tahun 2017 akan tetapi menunjukkan masih banyaknya data pelayanan kesehatan dasar yang belum mendukung kategori untuk Kota Bukittinggi dalam mencapai pengharagaan Kota Layak Anak ketingkat yang lebih baik.

Untuk pelayanan ramah anak di puskesmas belum semua puskesmas dapat melaksanakannya (empat Puskesmas yang sudah menginisi pelayanan Ramah Anak)

5) Klaster IV (Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya)

Yang menginisi sekolah ramah anak tahun 2016 sebanyak 2 sekolah tahun 2017 sebanyak 4 sekolah.

6) Klaster V (Perlindungan Khusus)

Jumlah korban kekerasan terhadap anak tahun 2016 sebanyak 12 kasus tahun 2017 sebanyak 24 kasus.

Dalam upaya peningkatan pencapaian kategori Kota Layak anak, terdapat beberapa kendala yang dihadapi antara lain :

- 1) Karena keterbatasan anggaran sehingga kegiatan yang mendukung kota layak anak tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya
- 2) Proses penyamaan persepsi dengan SKPD terkait kurang dapat dilakukan dengan optimal.
- 3) Data yang di butuhkan untuk melengkapi berkas penilaian kota layak anak ini tersebar pada beberapa SKPD terkait, adanya kendala pada pengambilan data ke SKPD terkait, untuk itu sangat di butuhkan dukungan dan komitmen dari SKPD.
- 4) Terbatasnya anggaran untuk melakukan rangkaian kegiatan dan koordinasi yang berhubungan dengan proses pengembangan Bukittinggi menjadi kota layak anak.

- 5) Kurangnya pemahaman pihak-pihak terkait tentang pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam mewujudkan kota layak ini yang berakibat masih kurangnya dukungan yang diberikan.
- 6) Perlunya standardisasi dalam perencanaan taman kota yang ramah anak.
- 7) Rentang waktu yang disediakan untuk mendapatkan dan melakukan proses entry data kurang memadai.

Program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran **Meningkatnya Peran serta Perempuan dan Anak dalam Pembangunan** adalah sebagai berikut :

1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan bertujuan untuk mewujudkan keserasian kebijakan di berbagai bidang pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas anak dan perempuan, di tingkat nasional dan daerah.

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 270.678.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 261.995.401,- dan tingkat realisasi mencapai angka 96,79 %.

1) Kegiatan Fasilitasi Penguatan Kota Layak Anak Melalui Pembentukan Kelurahan Ramah Anak

Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah kelurahan ramah anak yang difasilitasi dengan petugas zona selamat sekolah, advokasi dan evaluasi kota layak anak di bukittinggi dengan target 1 kelurahan, 150 org dan alokasi dana sebesar Rp. 92.024.500,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 87.359.051,- dengan tingkat realisasi keuangan 94,93% dan capaian realisasi fisik 100%.

2) Fasilitasi Pengembangan dan Perkuatan Forum Anak Daerah (Forda) dan Peringatan Hari Anak Nasional (HAN)

Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah pengurus FORDA yang didampingi, mengikuti peringatan HAN dengan target 33 orang, 1 kali dan alokasi dana sebesar Rp. 134.804.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 132.830.350,- dengan tingkat realisasi keuangan 98,54% dan capaian realisasi fisik 100%.

2. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, peran, dan kedudukan perempuan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan; dan meningkatkan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 216.004.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 209.822.997,- dan tingkat realisasi mencapai angka 97,14 %

1) Penguatan Ekonomi Perempuan Rentan Melalui KIE Pelatihan, Pemberian Bantuan dan Pameran

Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah perempuan yang dibina dengan target 30 orang dan alokasi dana sebesar Rp. 131.010.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 129.340.926,- dengan tingkat realisasi keuangan 98,73% dan capaian realisasi fisik 100%.

2) Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)

Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah kelompok P2WKSS yang dibina dengan target 1 Kelompok/ kelurahan dan alokasi dana sebesar Rp. 39.994.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 38.846.600,- dengan tingkat realisasi keuangan 97,13% dan capaian realisasi fisik 100%.

3. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan bertujuan untuk melakukan pemberdayaan perempuan sehingga perempuan berpartisipasi dalam pembangunan, pendidikan, politik, ekonomi dan terlibat dalam kegiatan publik yang lebih luas serta diskriminasi terhadap perempuan bisa diminimalisir.

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 1.959.318.050,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.743.643.701,- dan tingkat realisasi mencapai angka 88,99%.

1) Fasilitasi dan Perkuatan Organisasi Perempuan

Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah organisasi perempuan yang terfasilitasi dengan target 50 organisasi perempuan dengan alokasi dana sebesar Rp.

104.850.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 101.492.950,- dengan tingkat realisasi keuangan 96,80% dan capaian realisasi fisik 100%.

2) Fasilitas Peringatan Hari Ibu

Indikator kinerja kegiatan ini adalah Lomba dan Peringatan Hari Ibu dengan target 2 lomba dan 1 hari puncak Peringatan Hari Ibu dengan alokasi dana sebesar Rp. 98.100.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 93.643.200,- dengan tingkat realisasi keuangan 95,46% dan capaian realisasi fisik 100%.

3) Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Indikator kinerja kegiatan ini adalah PKK yang dibina, Jambore Kota yang dilaksanakan, Lomba PKK, Jambore Tingkat Propinsi yang diikuti dengan target 3 kecamatan, 1 kegiatan Jambore Kota, 4 lomba, 1 kegiatan Jambore Propinsi dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.700.080.550,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 1.493.348.301,- dengan tingkat realisasi keuangan 87,84 dan capaian realisasi fisik 100%.

4) Jambore Kader PKK Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat

Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jambore PKK berprestasi tingkat Propinsi Sumatera Barat dengan alokasi dana sebesar Rp. 744.539.600,- dan kegiatan ini anggarannya di nolkkan pada APBD Perubahan karena dana untuk kegiatan ini sudah terakomodir pada kegiatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.

5) Penguatan dan Pengembangan Organisasi Mitra PUG dan PP

Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Organisasi mitra yang difasilitasi dengan target 1 Organisasi dan alokasi dana sebesar Rp. 56.287.500,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 55.159.250,- dengan tingkat realisasi keuangan 97,99% dan capaian realisasi fisik 100%.

Sasaran 2 Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak

Pencapaian sasaran Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.2.1

Analisis Pencapaian Sasaran
antara target dengan realisasi kinerja tahun 2017
Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2017			Skala Nilai
					Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender	2. Meningkatkan Perlindungan perempuan dan anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan	Rasio	7,9	4,24	186,32 %	Di bawah target
			Rasio kekerasan terhadap anak.	Rasio	13,09	13,09	100%	Sesuai target

Sasaran meningkatkan **Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak** diukur dengan indikator yaitu :

1. Rasio kekerasan terhadap perempuan

Berdasarkan Prosedur Standar Operasional Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak yang disusun dan diterbitkan oleh Bagian Pengaduan Masyarakat Biro Hukum Dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2016, yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah setiap tindakan berdasarkan pada perbedaan jenis kelamin yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, mental, psikologis, termasuk intimidasi, pengusiran paksa, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, penelantaran serta menghalangi kemampuan perempuan dan anak untuk menikmati semua hak dan kebebasannya. Tidak bisa dipungkiri bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, juga terjadi di Kota Bukittinggi. Untuk melindungi perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan sebagaimana disebut di atas, maka Pemerintah Kota

Bukittinggi mempunyai tanggung jawab besar dalam memberikan perlindungan semaksimal mungkin kepada masyarakatnya, terutama perempuan dan anak melalui Dinas P3APKB.

Dinas P3APKB harus mampu berperan aktif dalam berbagai upaya melindungi perempuan dan anak, yang dimanifestasikan dalam bentuk pelayanan pengaduan, melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). P2TP2A bekerja sama dengan stake holder terkait, salahsatunya dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bukittinggi, memfasilitasi program pendampingan dan penjangkauan kepada masyarakat utamanya para perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Adapun kondisi kasus yang telah dilakukan pendampingan maupun penjangkauan pada 2 (dua) tahun terakhir, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.2.2

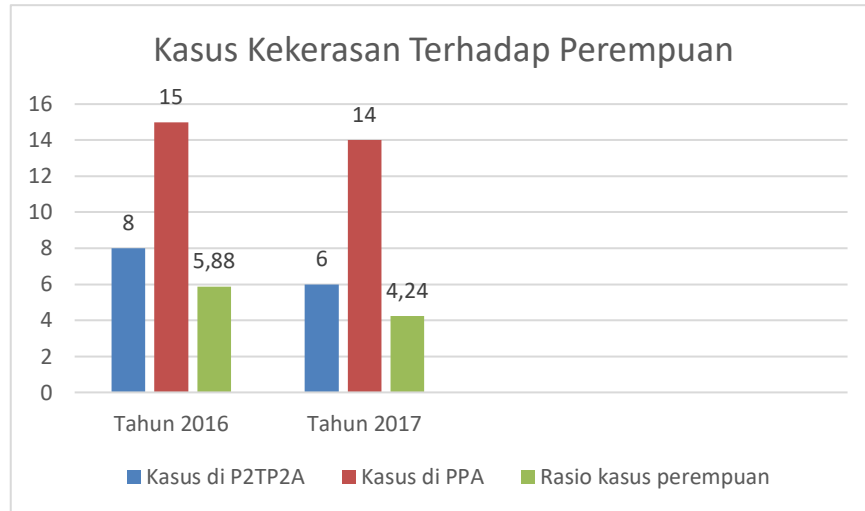
Data Populasi Perempuan dan kasus kekerasan
terhadap Perempuan di Kota Bukittinggi

Tahun	Kasus Perempuan		Jumlah	Jumlah Populasi Perempuan	Rasio kasus perempuan
	P2TP2A	PPA			
2016	8	15	23	39.131	5,88
2017	6	14	20	47.191	4,24

Adapun informasi jumlah populasi perempuan di Kota Bukittinggi dalam laporan ini berdasar pada data Kota Bukittinggi dalam Angka, yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi, tahun 2016 dan 2017.

Gambar 3.2.2.1

Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2016 dan Tahun 2017
Di Kota Bukittinggi



Dari jumlah kasus yang dilaporkan masyarakat Kota Bukittinggi sepanjang tahun 2016-2017 melalui P2TP2A dan Unit PPA Polres Bukittinggi, dapat dihitung rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dengan " *jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dibandingkan dengan jumlah populasi perempuan berusia diatas 18 tahun, dikalikan dengan 10.000 orang penduduk Kota Bukittinggi*".

Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan}}{\text{Jumlah populasi perempuan} > 18 \text{ Th}} \times 10.000 \\
 &= \frac{20}{47.191} \times 10.000 = 4,24
 \end{aligned}$$

Tabel 3.2.2.3

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2016 dengan 2017
Indikator Sasaran Rasio kekerasan terhadap perempuan

No.	Uraian	Tahun 2016			Tahun 2017		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Rasio kekerasan terhadap perempuan	8,4	5,88	142,86%	7,9	4,24	186,32%

Dari tabel di atas, terlihat bahwa rasio kekerasan terhadap perempuan cenderung menurun, dari 5,88 menjadi 4,24. Kondisi ini sangat mungkin dipengaruhi oleh hasil konsistensi dari Dinas P3APKB dalam mengawal program perlindungan terhadap perempuan.

Tabel 3.2.2.4

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

No	Uraian	Realisasi tahun 2017	Target Renstra (2021)	Capaian terhadap Renstra
1.	Rasio kekerasan terhadap perempuan	4,24	9,31	219,57%

Rasio kekerasan terhadap perempuan cenderung menurun dari 5,88 tahun 2016 menjadi 4,24 pada tahun 2017. Kondisi ini sangat mungkin dipengaruhi oleh hasil konsistensi dari Dinas P3APKB dalam mengawal program perlindungan terhadap perempuan khususnya, melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, yaitu sebagai berikut :

1. Survey pengalaman hidup perempuan Kota Bukittinggi tahun 2017
2. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang KDRT dan TPPO

3. Pembentukan Forum Bundo Kota Bukittinggi
4. Pelatihan asertif bagi mitra kerja Dinas P3APKB Kota Bukittinggi
5. Seminar dan konseling kelompok bagi perempuan korban kebakaran di Kota Bukittinggi.

Dinas P3APKB menetapkan target tersebut dengan memprediksi laporan kasus kekerasan akan meningkat dengan adanya kegiatan berupa komunikasi, informasi dan edukasi terhadap masyarakat tentang three ends (akhiri kekerasan terhadap perempuan, anak dan kesenjangan ekonomi). Namun selama ini ada beberapa hal kemungkinan yang menyebabkan masyarakat enggan untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya, disebabkan antara lain :

1. Adanya rasa enggan untuk melapor dan mengungkapkan tindak kekerasan yang terjadi, karena sebagian dari masyarakat masih menganggap kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan keluarga sendiri tidak perlu dicampuri urusan rumah tangganya oleh orang lain;
2. Karakteristik dari tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga pelakunya adalah pasangannya sendiri yakni sang suami;
3. Tindak kekerasan dengan sengaja tidak dilaporkan atau korban berusaha sendiri untuk menyelesaikan masalahnya sendiri.

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan berbasis gender yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut.

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pencapaian kinerja untuk pengendalian kasus kekerasan terhadap perempuan adalah :

- Meningkatkan kualitas pengelolaan, Pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan
- Meningkatkan peran serta elemen/lembaga masyarakat, pemerintah dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
- Program Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan.

2. Rasio kekerasan terhadap Anak.

Berdasarkan Prosedur Standar Operasional Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak yang disusun dan diterbitkan oleh Bagian Pengaduan Masyarakat Biro Hukum Dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2016, yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah setiap tindakan berdasarkan pada perbedaan jenis kelamin yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, mental, psikologis, termasuk intimidasi, pengusiran paksa, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, penelantaran serta menghalangi kemampuan perempuan dan anak untuk menikmati semua hak dan kebebasannya. Tidak bisa dipungkiri bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, juga terjadi di Kota Bukittinggi. Untuk melindungi perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan sebagaimana disebut di atas, maka Pemerintah Kota Bukittinggi mempunyai tanggung jawab besar dalam memberikan perlindungan semaksimal mungkin kepada masyarakatnya, terutama perempuan dan anak melalui Dinas P3APKB.

Dinas P3APKB harus mampu berperan aktif dalam berbagai upaya melindungi perempuan dan anak, yang dimanifestasikan dalam bentuk pelayanan pengaduan, melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). P2TP2A bekerja sama dengan stake holder terkait, salahsatunya dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bukittinggi, memfasilitasi program pendampingan dan penjangkauan kepada masyarakat utamanya para perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Adapun kondisi kasus yang telah dilakukan pendampingan maupun penjangkauan pada 2 (dua) tahun terakhir, adalah sebagai berikut:

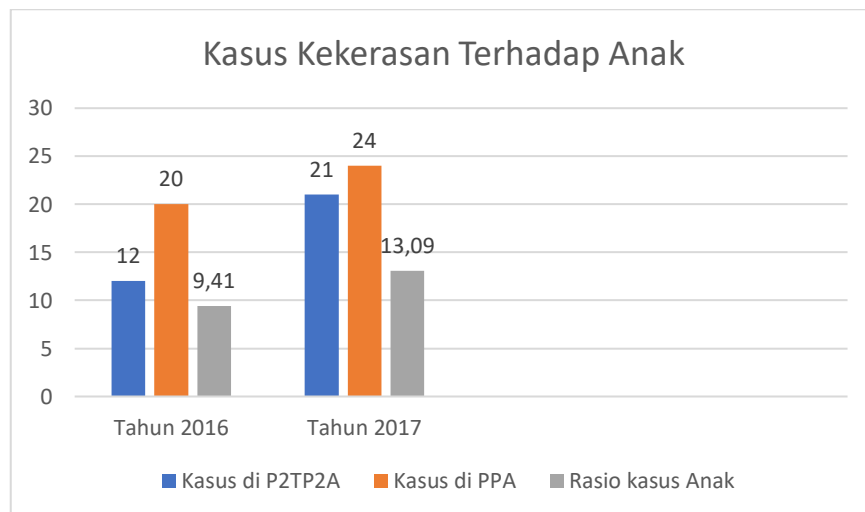
Tabel 3.2.2.5

Data Populasi Anak dan kasus kekerasan terhadap Anak di Kota Bukittinggi

Tahun	Kasus Anak		Jumlah	Jumlah Populasi Anak	Rasio kasus Anak
	P2TP2A	PPA			
2016	12	20	32	33.999	9,41
2017	21	24	45	34.375	13,09

Gambar 3.2.2.2

Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2016 dan Tahun 2017 Di Kota Bukittinggi



Dari jumlah kasus yang dilaporkan masyarakat Kota Bukittinggi sepanjang tahun 2016-2017 melalui P2TP2A dan Unit PPA Polres Bukittinggi, dapat dihitung rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dengan” *jumlah kasus kekerasan terhadap anak dibandingkan dengan jumlah populasi anak dikalikan dengan 10.000 orang anak Kota Bukittinggi*”

Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah kasus kekerasan terhadap anak}}{\text{Jumlah populasi anak}} \times 10.000 \\
 &= \frac{45}{34.375} \times 10.000 = 13,09
 \end{aligned}$$

Tabel 3.2.2.3

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2016 dengan 2017
Indikator Sasaran Rasio kekerasan terhadap Anak

No.	Uraian	Tahun 2016			Tahun 2017		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Rasio kekerasan terhadap Anak	13,09	9,41	139,11%	13,09	13,09	100%

Dari tabel di atas, terlihat bahwa rasio kekerasan terhadap Anak cenderung meningkat, hal ini kemungkinan besar diakibatkan oleh kesesuaian antara pelaksanaan program dan kebutuhan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan.

Tabel 3.2.2.4

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

No	Uraian	Realisasi tahun 2017	Target Renstra (2021)	Capaian terhadap Renstra
1.	Rasio kekerasan terhadap Anak	13,09	11,92	91,06%

Kasus kekerasan terhadap anak, masih terlihat bahwa rasio kasus kekerasan yang terjadi dan yang dilaporkan masyarakat melalui P2TP2A ataupun Unit PPA Polres Bukittinggi, pada tahun 2016 – 2017 cenderung meningkat. Hal ini kemungkinan besar diakibatkan oleh kesesuaian antara pelaksanaan program dan kebutuhan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan. Kondisi ini merupakan tantangan tersendiri bagi Dinas P3APPKB untuk tetap selalu berusaha menciptakan inovasi-inovasi baru terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, baik yang bersifat adaptasi maupun modifikasi dari metode sebelumnya yang sudah

pernah dilakukan. Penetapan metode yang tepat akan dilakukan melalui beberapa kajian sederhana, agar upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terutama yang terjadi pada anak dapat lebih efektif dan efisien, sesuai dengan yang diharapkan.

Program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran **Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak** adalah sebagai berikut :

1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan bertujuan untuk mewujudkan keserasian kebijakan di berbagai bidang pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas anak dan perempuan, di tingkat nasional dan daerah.

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 270.678.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 261.995.401,- dan tingkat realisasi mencapai angka 96,79 %.

1) Fasilitas Pembentukan dan Perkuatan Lembaga Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPTPPO)

Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah data dan Bimtek/Pelatihan/Pertemuan terlaksana dengan target 1 satgas, 4050 data, 2 kali pertemuan dan alokasi dana sebesar Rp. 30.000.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 27.770.000,- dengan tingkat realisasi keuangan 92,57% dan capaian realisasi fisik 100%.

2) Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan tentang KDRT dan TPPO

Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi dengan target 50 peserta dan alokasi dana sebesar Rp. 13.850.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 13.136.000,- dengan tingkat realisasi keuangan 94,84% dan capaian realisasi fisik 100%.

2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Program ini bertujuan untuk memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak di berbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah.

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 216.231.536,- dengan realisasi sebesar Rp. 204.845.302,- dan tingkat realisasi mencapai angka 94,73 %

1) Perkuatan dan Pengembangan P2TP2A

Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Peserta pelatihan, pelayanan dan pendampingan korban KDRT bagi pengurus dan relawan P2TP2A serta penyelesaian pengaduan perlindungan Perempuan dan anak dengan target 30 orang pengurus dan relawan, 20 kasus terselesaikan dan alokasi dana sebesar Rp. 216.231.536,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 204.845.302,- dengan tingkat realisasi keuangan 94,73% dan capaian realisasi fisik 100%.

3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, peran, dan kedudukan perempuan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan; dan meningkatkan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 216.004.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 209.822.997,- dan tingkat realisasi mencapai angka 97,14 %

1) Forum Koordinasi Penanganan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan, Eksploitasi dan Trafiking

Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Forum Koordinasi terlaksana dengan target 1 kali pertemuan teknis, 2 kali FGD, 7 kali pendampingan dan alokasi dana sebesar Rp. 45.000.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 41.635.471,- dengan tingkat realisasi keuangan 92,52% dan capaian realisasi fisik 100%.

Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Program Keluarga Berencana

Pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Program Keluarga Berencana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.3.1

Analisis Pencapaian Sasaran
antara target dengan realisasi kinerja tahun 2017
Meningkatnya Kualitas Program Keluarga Berencana

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2017			Skala Nilai
					Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Terkendali Jumlah penduduk	1. Meningkatnya kualitas program Keluarga Berencana	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	%	68%	63,79%	93,81 %	
			Age Spesific Fertility Rates (ASFR)	Jumlah	96	96,04	100%	Dinas P3APP KB

Sasaran meningkatkan **Meningkatnya kualitas Program Keluarga Berencana** diukur dengan indikator yaitu :

1. Contraceptive Prevalence Rate (CPR)

Angka pemakaian kontrasepsi yang lazim disebut Contraceptive Prevalence Rate (CPR) adalah persentase perempuan usia reproduktif yang menggunakan (atau yang pasangannya menggunakan) suatu metode kontrasepsi pada suatu waktu tertentu. CPR hampir selalu dilaporkan untuk wanita kawin atau wanita yang memiliki pasangan seksual. CPR dapat digunakan untuk mengukur

pemakaian semua metode kontrasepsi, baik yang tradisional maupun modern, atau untuk mengukur pemakaian metode kontrasepsi modern saja.

Contraceptive Prevalence Rate (CPR) merupakan perbandingan jumlah peserta KB aktif dengan jumlah pasangan usia subur kemudian hasilnya dikali 100. Pada tahun 2017 jumlah peserta KB aktif adalah sebanyak 10.496 orang sementara jumlah pasangan usia subur adalah 16.455 orang.

$$CPR = \frac{\text{Jumlah peserta KB aktif}}{\text{Jumlah Pasangan Usia subur}} \times 100 = \frac{10.496}{16.455} \times 100 = 63,79\%$$

Tabel 3.2.3.2

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2016 dengan 2017
Indikator Contraceptive Prevalence Rate (CPR)

No.	Uraian	Tahun 2016			Tahun 2017		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	65 %	61,72 %	94,95 %	65%	63,79%	96,92%

Capaian CPR tahun 2017 belum mencapai target 65%, namun pencapaian 63,79 % itu merupakan pencapaian maksimal Kota Bukittinggi. Capaian CPR tahun 2017 jika dibanding dengan capaian tahun 2106 dari tabel diatas menunjukkan bahwa persentase capaian CPR pada tahun 2017 mengalami kenaikan.

Capaian CPR sampai tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2.3.3

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

No	Uraian	Realisasi tahun 2017	Target Renstra (2021)	Capaian terhadap Renstra
1.	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	63,79%	66%	96,65%

Capaian Contraceptive prevalence rate (CPR) pada tahun 2017 terhadap target jangka menengah rencana strategis adalah sebesar 96,65 %, untuk mencapai 100 % di periode akhir perencanaan menengah maka akan dilakukan upaya – upaya sebagai berikut :

- Melakukan peningkatan KIE dan penggerakan program KKBPK
- Melakukan peningkatan monitoring dan evaluasi program KKBPK

Tabel 3.2.3.4

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 dengan standar Nasional

No	Uraian	Realisasi tahun 2017	Standar Nasional	Capaian
1	Contraceptive prevalence rate (CPR)	63,79%	65,6%	97,24

Capaian Contraceptive prevalence rate (CPR) pada tahun 2017 dibandingkan dengan target CPR Nasional, capaiannya hampir mencapai target Nasional yaitu sebesar 97,24%. Artinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi sudah berkinerja baik namun masih perlu peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, peningkatan sarana dan prasarana serta KIE program KKBPK.

Contraceptive prevalence rate (CPR) apabila kita lihat dari capaian kinerja tahun lalu dengan tahun ini mengalami kenaikan artinya kinerja Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi meningkat karena :

- Peningkatan Program advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Keluarga Berencana terhadap masyarakat.
- Peningkatan sarana dan prasarana program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
- Peningkatan peran serta lintas sektor dalam program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga terutama pada Pembangunan Kampung KB
- Melakukan Peningkatan Pendayaagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB dan kader KB
- Adanya Dukungan penunjang operasional PPKBK, sub PPKBK dan kader Poktan dari APBD Kota Bukittinggi.
- Dilakukannya peningkatan kapasitas kader, tokoh masyarakat dan tokoh agama baik di Kota maupun di tingkat Provinsi.

Namun apabila kita lihat dari target yang ditetapkan pada rencana strategis yaitu sebesar 66 %, maka capaian kinerja dinas pada tahun 2017 berada dibawah target Renstra, hal ini dikarenakan penetapan target daerah di dalam renstra lebih tinggi dari target nasional. Target nasional adalah sebesar 65 %. Dengan pencapaian 63,79 % itu merupakan pencapaian maksimal Kota Bukittinggi dengan beberapa catatan antara lain :

- Adanya PUS yang hamil
- Adanya PUS yang ingin anak segera
- Adanya unmet need (tidak ingin anak lagi dan ingin anak ditunda)

2. Age Spesific Fertility Rates (ASFR)

Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur (ASFR) adalah jumlah kelahiran hidup oleh ibu pada golongan umur tertentu yang dicatat selama satu tahun per 1.000 penduduk wanita pada golongan umur tertentu pada tahun yang sama.

Di antara kelompok perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) terdapat variasi kemampuan melahirkan, karena itu perlu dihitung tingkat fertilitas

perempuan pada tiap-tiap kelompok umur (age specific fertility rate). Angka ini menunjukkan banyaknya kelahiran menurut umur wanita yang berada dalam kelompok umur antara 15-49 tahun per wanita pada kelompok umur yang sama. Dengan demikian semakin banyak ibu yang berada di suatu kelompok umur tersebut, akan lebih memungkinkan kelompok umur tersebut memiliki angka kelahiran yang lebih tinggi. Angka fertilitas menurut golongan umur dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan angka kelahiran kasar karena tingkat kesuburan pada setiap golongan umur tidak sama hingga gambaran kelahiran menjadi lebih teliti. Perhitungan fertilitas menurut golongan umur biasanya dilakukan dengan interval 5 tahun hingga bila wanita dianggap usia subur terletak antara umur 15-49 tahun, akan di peroleh sebanyak 7 golongan umur. Dengan demikian dapat di susun menjadi distribusi frekuensi pada setiap golongan umur. Dari distribusi frekuensi tersebut, dapat diketahui pada golongan umur berapa yang mempunyai tingkat kesuburan tertinggi. Hal ini penting untuk menentukan prioritas program keluarga berencana.

Pembangunan penduduk usia remaja merupakan sasaran Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi pada remaja, mengakibatkan banyak terjadi perkawinan di bawah usia 20 tahun. Berdasarkan hasil Pendataan yang dilakukan pada tahun 2017 didapat perempuan kelompok umur 15 – 19 tahun adalah sebanyak 4.342 orang yang sementara jumlah kelahiran bayi pada kelompok umur 15 – 19 tahun 2017 adalah sebanyak 417 orang.

ASFR (15 – 19 tahun) dihitung dengan :

$$\begin{aligned}
 & ASFR (15 - 19) \\
 &= \frac{\text{Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15 - 19}}{\text{Jumlah penduduk perempuan kelompok umur 15 - 19 pada pertengahan tahun yang sama}} \times k \\
 &= \frac{417}{4.342} \times 1000 = 96,04
 \end{aligned}$$

B_i = Jumlah kelahiran bayi dari wanita pada kelompok umur i

P_i = Jumlah perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun

K = bilangan konstan, 1000

Tabel 3.2.3.5

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2016 dengan 2017
Age Spesific Fertility Rates (ASFR)

No.	Uraian	Tahun 2016			Tahun 2017		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Age Spesific Fertility Rates (ASFR 15 - 19)	98	97	101%	96	96,04	100%

Tabel 3.2.3.6

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

Age Spesific Fertility Rates (ASFR)

No.	Uraian	Tahun 2016			Tahun 2017		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Age Spesific Fertility Rates (ASFR 15 - 19)	98	97	101%	96	96,04	100%

Program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran **Meningkatnya Kualitas Program Keluarga Berencana** adalah sebagai berikut:

1. Program Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana bertujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dalam mewujudkan keluarga kecil yang bahagia sejahtera. Program Keluarga Berencana juga akan memperbaiki kesehatan dan kesejahteraan ibu, anak, keluarga dan bangsa dan juga akan berdampak kepada penurunan angka kematian ibu dan anak, meningkatnya Pasangan Usia Subur yang ber KB dan menurunnya angka kelahiran (Total fertility Rate) untuk menaikkan taraf hidup rakyat dan bangsa.

Program Keluarga Berencana ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 3.622.709.161,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.726.754.708,- dan tingkat realisasi mencapai angka 75,27%

1) Pelayanan KIE/Teknik Motivasi dan Konseling Program KB/KS

Indikator kinerja kegiatan ini adalah Terlaksananya KIE /teknik motivasi baik melalui media cetak maupun elektronik dengan target 24 kali KIE, 12 kali Lliputan,cetak, 1 kali liputan elektronik dan alokasi dana sebesar Rp. 24.640.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 24.396.500,- dengan tingkat realisasi keuangan 99,01% dan capaian realisasi fisik 100%.

2) Kancan Bhakti Saka Kencana

Indikator kinerja kegiatan ini adalah Peserta yang mengikuti Bhakti Saka Kencana dengan target 35 org dan alokasi dana sebesar Rp. 38.000.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 36.656.200,- dengan tingkat realisasi keuangan 94,46% dan capaian realisasi fisik 100%.

3) Manunggal KB-KES

Indikator kinerja kegiatan ini adalah Operasional Manunggal KB Kes dengan target 5 kegiatan dan alokasi dana sebesar Rp. 65.000.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 63.985.375,- dengan tingkat realisasi keuangan 98,44% dan capaian realisasi fisik 80 %.

Tidak optimalnya capaian kinerja disebabkan oleh kegiatan Manunggal KB Kes yang semula direncanakan dengan 5 mitra yaitu IpeKB, PKK, TNI, IBI dan Bhayangkara pada tahun 2017 hanya bisa dilakukan dengan

4 (empat) mitra yaitu IpeKB, PKK, TNI dan IBI sementara dengan Bhayangkara belum bisa kita laksanakan karena Bhayangkara belum ada momen untuk pelaksanaan kegiatan Manunggal KB-Kes serta belum adanya MOU antara BKKBN dengan Bhayangkara Pusat.

4) Pelayanan KB Serentak dan Komplikasinya

Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah peserta KB dengan target 1829 orang dan alokasi dana sebesar Rp. 35.735.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 33.592.500,- dengan tingkat realisasi keuangan 94,004% dan capaian realisasi fisik 100 %.

5) Pemberian Penghargaan KB Teladan

Indikator kinerja kegiatan ini adalah Perlombaan yang dilaksanakan dengan target 10 jenis lomba dan alokasi dana sebesar Rp. 46.515.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 45.752.500,- dengan tingkat realisasi keuangan 98,36% dan capaian realisasi fisik 100 %.

6) Pengadaan sarana dan Prasarana Penyuluhan KB (DAK Fisik Bidang Kesehatan Keluarga Berencana 2017)

Indikator kinerja kegiatan ini adalah Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan KB dengan target 3 Balai Penyuluh KB dan alokasi dana sebesar Rp. 437.000.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 344.289.000,- dengan tingkat realisasi keuangan 78,78% dan capaian realisasi fisik 100 %.

Tidak optimalnya capaian anggaran disebabkan oleh belanja modal pengadaan kendaraan bermotor roda dua dan belanja cetak yang sebagian anggarannya tidak teralisasi 100% namun secara fisik terealisasi seluruhnya karena pengadaan dan cetak tersebut mengacu kepada menu DAK yang sudah ada.

7) Operasional Penyuluhan KB (DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB 2017)

Indikator kinerja kegiatan ini adalah Terlaksananya peningkatan kinerja PLKB dengan target 10 Orang dan alokasi dana sebesar Rp. 289.800.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 275.525.950,- dengan tingkat realisasi keuangan 95,07% dan capaian realisasi fisik 100%.

8) DAK Bidang Keluarga Berencana (Sisa DAK 2010 – 2015)

Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Gudang, Mobil alakon, Genre Kit, Obgyn bed, IUD kit dan sterilisasi elektrik, AC dengan target 1 Gudang, 1 Mobil alakon, 5 Genre Kit, 10 Obgyn bed, 23 IUD kit dan sterilisasi elektrik, AC dan alokasi dana sebesar Rp. 1.799.324.161,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 1.055.827.780,- dengan tingkat realisasi keuangan 58,68% dan capaian realisasi fisik 97,5%.

Tidak optimalnya capaian anggaran disebabkan oleh belanja Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat dan Belanja modal pengadaan kendaraan bermotor angkutan barang yang sebagian anggarannya tidak terealisasi 100% namun secara fisik terealisasi seluruhnya karena belanja barang dan belanja modal tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan dan mengacu kepada menu DAK yang sudah ada.

9) Penunjang Operasional PPKBK dan Sub PPKBK serta Kader

Indikator kinerja kegiatan ini Pemberian honorarium PPKBK dan SUB PPKBK serta kader dengan target 390 orang dan alokasi dana sebesar Rp. 283.673.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 277.715.000,- dengan tingkat realisasi keuangan 97,90% dan capaian realisasi fisik 100%.

10) Penunjang Operasional Peserta KB, IUD, Implant dan Kader KB

Indikator kinerja kegiatan ini Jumlah Peserta KB baru MKJP dengan target 291 Orang dan alokasi dana sebesar Rp. 30.000.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 24.650.000,- dengan tingkat realisasi keuangan 82,17% dan capaian realisasi fisik 100%.

11) Promosi Gelanggang Dagang Kelompok UPPKS

Indikator kinerja kegiatan ini Pameran dagang yang dilaksanakan dengan target 3 kali dan alokasi dana sebesar Rp. 70.780.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 67.223.300,- dengan tingkat realisasi keuangan 94,97% dan capaian realisasi fisik 100%.

12) Peringatan HARGANAS Kota, Provinsi dan Nasional

Indikator kinerja kegiatan ini Peringatan Hari Keluarga Nasional tingkat Kota, provinsi dan nasional dengan target 3 kali dan alokasi dana sebesar Rp. 90.000.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 86.381.700,- dengan tingkat realisasi keuangan 95,98% dan capaian realisasi fisik 100%.

13) Jambore Program KKBPK

Indikator kinerja kegiatan ini Jambore yang dilaksanakan (Petugas KB berprestasi) dengan target 1 kali dan alokasi dana sebesar Rp. 54.132.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 51.744.950,- dengan tingkat realisasi keuangan 95,59% dan capaian realisasi fisik 100%.

14) Fasilitas Lapangan Program KKBPK

Indikator kinerja kegiatan ini Jambore Kader IMP dan PLKB terpadu dengan target 36 orang dan alokasi dana sebesar Rp. 35.000.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 33.451.550,- dengan tingkat realisasi keuangan 95,57% dan capaian realisasi fisik 100%.

15) Fasilitas Kampung KB

Indikator kinerja kegiatan ini Kampung KB yang dibina dengan target 1 kampung KB dan alokasi dana sebesar Rp. 60.000.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 58.913.600,- dengan tingkat realisasi keuangan 98,19% dan capaian realisasi fisik 100%.

2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Program Kesehatan Reproduksi Remaja bertujuan untuk memberikan pelayanan informasi tentang Kesehatan Remaja, memiliki informasi yang benar mengenai proses reproduksi serta berbagai faktor yang ada disekitarnya. Dengan informasi yang benar, diharapkan remaja memiliki sikap dan tingkah laku yang bertanggung jawab mengenai proses reproduksi. Dalam hal ini Kesehatan reproduksi remaja adalah suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem, fungsi dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Pengertian sehat disini tidak semata-mata berarti bebas penyakit atau bebas dari kecacatan namun juga sehat secara mental serta sosial kultural. pemahaman dan kesadaran untuk mencapai keadaan sehat secara reproduksi. Banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan hal ini, mulai dari pemahaman mengenai perlunya pemeliharaan kebersihan alat reproduksi, pemahaman mengenai proses-proses reproduksi serta dampak dari perilaku yang tidak bertanggung jawab seperti kehamilan tak diinginkan, aborsi, penularan penyakit menular seksual termasuk HIV.

Program Kesehatan Reproduksi Remaja ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 199.753.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 194.886.000,- dan tingkat realisasi mencapai angka 97,56%

1) Pelatihan KRR bagi Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya

Indikator kinerja kegiatan ini Peserta Pelatihan KRR bagi Pendidik Sebaya dan Konselor sebaya dengan target 90 Orang dan alokasi dana sebesar Rp. 39.990.000,- dan dapat terialisasi sebesar Rp. 39.990.000,- dengan tingkat realisasi keuangan 100% dan capaian realisasi fisik 100%.

2) Fasilitas Program Generasi Berencana

Indikator kinerja kegiatan ini Pemilihan duta pelajar/mahasiswa Genre, pengayom, motivator dan kreator Genre dengan target 54 orang, 3 kali dan alokasi dana sebesar Rp. 95.840.000,- dan dapat terialisasi sebesar Rp. 92.157.750,- dengan tingkat realisasi keuangan 96,16% dan capaian realisasi fisik 98,25%.

3) Pelatihan KRR bagi Guru BK dan Kepala Sekolah terhadap Bahaya Narkoba, HIV/AIDS

Indikator kinerja kegiatan ini Peserta Pelatihan KRR bagi Kepala Sekolah dan Guru dengan target 110 Orang, dan alokasi dana sebesar Rp. 41.263.000,- dan dapat terialisasi sebesar Rp. 41.263.000,- dengan tingkat realisasi keuangan 100% dan capaian realisasi fisik 100%.

4) Penyelenggaraan Bimbingan Terpadu Program KKBPK

Indikator kinerja kegiatan ini Jumlah kegiatan bimbingan terpadu program KKBPK dengan target 6 kali, dan alokasi dana sebesar Rp. 22.660.000,- dan dapat terialisasi sebesar Rp. 21.475.250,- dengan tingkat realisasi keuangan 94,77% dan capaian realisasi fisik 100%.

3. Program Pelayanan Kontrasepsi

Program Pelayanan Kontrasepsi bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kontrasepsi serta menjamin ketersediaan alat dan obat kontrasepsi.

Program Pelayanan Kontrasepsi ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 18.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 17.120.000,- dan tingkat realisasi mencapai angka 95,11%

1) **Penunjang Operasional Klinik KB**

Indikator kinerja kegiatan ini Klinik KB yang berfungsi dengan target 25 klinik dan alokasi dana sebesar Rp. 18.000.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 17.120.000,- dengan tingkat realisasi keuangan 95,11% dan capaian realisasi fisik 100%.

4. **Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga**

Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga ini bertujuan untuk meningkatkan peran pemerintah dalam mendampingi kelompok bina keluarga di masyarakat.

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 86.200.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 80.413.150,- dan tingkat realisasi mencapai angka 93,29 %.

1) **Fasilitasi dan Pelatihan Kader Poktan (BKB, BKR, BKL, UPPKS)**

Indikator kinerja kegiatan ini Peserta pelatihan dan POKTAN yang difasilitasi dengan target 222 org, 4 poktan dan alokasi dana sebesar Rp. 46.200.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 44.223.000,- dengan tingkat realisasi keuangan 95,72% dan capaian realisasi fisik 100%.

2) **Pembentukan dan Penandampingan Poktan**

Indikator kinerja kegiatan ini Jumlah kelompok Kegiatan (POKTAN) yang dibentuk dan didampingi dengan target 72 kelompok dan alokasi dana sebesar Rp. 40.000.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 36.190.150,- dengan tingkat realisasi keuangan 90,47% dan capaian realisasi fisik 100%.

Sasaran 4 Meningkatnya kualitas kebijakan Pengendalian Kependudukan

Pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas kebijakan Pengendalian Pendudukan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.4.1

Analisis Pencapaian Sasaran
antara target dengan realisasi kinerja tahun 2017
Meningkatnya kualitas kebijakan Pengendalian Pendudukan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2017			Skala Nilai
					Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Terkendali Jumlah penduduk	4. Meningkatkan kualitas kebijakan Pengendalian Kependudukan	Persentase dokumen kependudukan yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	%	20%	20%	100%	Sesuai target

Sasaran meningkatkan **kualitas kebijakan Pengendalian Penduduk** diukur dengan indikator yaitu “**Persentase dokumen kependudukan yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan**”.

Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan keluarga.

Pembangunan Kependudukan dengan memaknai peraturan Presiden RI Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK), kewajiban Pemerintah Pusat, Provinsi dan kabupaten/Kota dalam menemukan masalah dan formulasi solusi terkait laju pertumbuhan yang tinggi, kualitas penduduk yang masih rendah, pembangunan keluarga yang belum optimal, perebaran penduduk yang belum proporsional dan administrasi penduduk yang belum tertib memerlukan koordinasi dan sinergi yang disusun berdasarkan tahapan perencanaan yang holistik dan komprehensif. Pembangunan Kependudukan diaktualisasikan dalam format Grand Desain

Pembangunan Kependudukan (GDPK) dalam rangka menciptakan panduan pelaksanaan pembangunan daerah yang berwawasan Kependudukan. Grand desain pembangunan Kependudukan (GDPK) terdiri dari 5 grand desain :

a. Kuantitas Penduduk

1. Jumlah Penduduk menurut struktur umur
 - Umur median
 - Piramida Penduduk
 - Rasio ketergantungan
 - Rasio kepadatan penduduk
 - Laju Pertumbuhan Penduduk
2. Jumlah Penduduk menurut usia sekolah
3. Jumlah Penduduk menurut jenis kelamin
 - Rasio jenis kelamin
4. Jumlah Penduduk menurut tingkat pendidikan
5. Jumlah Penduduk menurut agama dan kepercayaan
6. Jumlah Penduduk menurut status kawin
 - Angka perkawinan kasar
 - Angka perkawinan umum
 - Angka perkawinan menurut kelompok umur
 - Rata- rata umur kawin pertama
 - Angka perceraian kasar
 - Angka perceraian umum
7. Kelahiran
 - Jumlah kelahiran
 - Angka kelahiran kasar
8. Kematian
 - Jumlah kematian
 - Angka kematian kasar

b. Kualitas Penduduk

1. Kesehatan
 - Kelahiran
 - a. Angka kelahiran menurut umur (ASFR)

- b. Angka kelahiran total (TFR)
 - c. Rasio anak dan perempuan (CWR)
- Kematian
 - a. Angka kematian bayi (infant mortality rate/IMR/AKB)
 - b. Angka kematian neo natal (kematian bayi baru lahir/NNDR)
 - c. Angka kematian Post Neonatal (angka kematian lepas baru lahir/PNNDNR)
 - d. Angka kematian anak
 - e. Angka kematian Balita
 - f. Angka kematian Ibu (maternal mortality rate/AKI)
- 2. Pendidikan
 - Angka melek huruf
 - Angka partisipasi kasar
 - Angka partisipasi murni
 - Angka partisipasi sekolah
 - Angka putus sekolah
 - Angka kelulusan
 - Angka melanjutkan
 - Fasilitas Pendidikan
 - Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah
 - Rasio guru murid
 - Rasio Murid per kelas
 - Rasio Kelas per guru
 - Rasio guru per sekolah
 - Rasio guru mata pelajaran per sekolah
- 3. Ekonomi
 - Jumlah dan proposal tenaga kerja
 - Jumlah dan proporsi angkatan kerja
 - Jumlah dan proporsi penduduk yang bekerja menurut jenis pekerjaan
 - Pengangguran terbuka
 - Pertumbuhan PDRB
- 4. Sosial
 - Jumlah Penyandang masalah kesejahteraan sosial

- Proporsi Penduduk penyandang cacat
- Proporsi penduduk miskin penerima jaminan kesehatan
- c. Mobilitas Penduduk
 1. Mobilitas permanen
 - Migrasi masuk
 - Migrasi keluar
 - Migrasi Neto
 - Migrasi bruto
 - Persentase Migrasi dari Perdesaan ke Perkotaan
 - Transmigrasi
 - Pemukiman kembali
 2. Mobilitas Non Permanen
 3. Urbanisasi
 - Persentase Penduduk Kota
 - Rasio Kota dan Desa
- d. Pembangunan Keluarga
 1. Jumlah keluarga dan rata-rata jumlah anggota keluarga
 2. Status hubungan dengan kepala keluarga
 3. Karakteristik kepala keluarga menurut umur
 4. Karakteristik kepala menurut jenis kelamin
 5. Karakteristik kepala keluarga menurut status kawin
 6. Karakteristik kepala keluarga menurut pendidikan
 7. Karakteristik kepala keluarga menurut status bekerja
- e. Data Kependudukan
 1. Kepemilikan kartu keluarga
 2. Kepemilikan kartu penduduk
 3. Kepemilikan akta
 - Kepemilikan akta kelahiran
 - Kepemilikan akta perkawinan
 - Kepemilikan akta perceraian
 - Kepemilikan akta kematian
 - Pengakuan, pengesahan dan pengangkatan anak serta peristiwa penting lainnya.

Persentase dokumen kependudukan yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan dihitung dengan membagi jumlah grand desain yang dimanfaatkan untuk pengambilan kebijakan dengan jumlah grand desain yang seharusnya, kemudian hasilnya dikali 100.

$$\begin{aligned}
 & \text{Persentase dokumen kependudukan yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan} \\
 &= \frac{\text{grand desain yang dimanfaatkan untuk pengambilan kebijakan}}{\text{grand desain yang seharusnya}} = \frac{1}{5} \times 100 \\
 &= 20\%
 \end{aligned}$$

Tabel 3.2.4.2

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2016 dengan 2017
Indikator Persentase dokumen kependudukan yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan

No	Uraian	Tahun 2016			Tahun 2017		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase dokumen kependudukan yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	20%	20%	100%	20%	20%	100%

Grand desain yang sudah ada di Kota Bukittinggi yaitu Grand desain Pengendalian penduduk (Grand desain kuantitas penduduk) dari 5 grand desain yang seharusnya ada. Grand desain kuantitas penduduk bertujuan untuk dapat mewujudkan penduduk tumbuh seimbang secara berkelanjutan yang ditetapkan melalui perkiraan angka fertilitas, mortalitas dan migrasi

Tabel 3.2.4.3

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

No	Uraian	Realisasi tahun 2017	Target Renstra (2021)	Capaian terhadap Renstra
1.	Persentase dokumen kependudukan yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	20%	20%	100%

Kebijakan kependudukan belum sepenuhnya menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan. Merujuk pada amanat ICPD (international conference on population and development tahun 1994 di kairo bahwa :

1. Pengintegrasian kebijakan kependudukan ke dalam kebijakan pembangunan mutlak di perlukan.
2. Kepedulian berbagai stakeholder penting dalam mendukung integrasi tersebut demi terwujudnya window opportunity.
3. Perlu disusun GDPK untuk memberikan arah Pembangunan berwawasan Kependudukan dengan 5 grand desain.

Pada tahun 2017 sudah dilakukan rapat koordinasi, konsultasi dan sosialisasi baik ke Pusat , Provinsi dan SKPD terkait untuk penyusunan GDPK.

Program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran **Meningkatnya kualitas kebijakan Pengendalian Kependudukan** adalah sebagai berikut:

1. Program Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana bertujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dalam mewujudkan keluarga kecil yang bahagia sejahtera. Program Keluarga Berencana juga akan memperbaiki kesehatan dan kesejahteraan ibu, anak, keluarga dan bangsa dan juga akan berdampak kepada penurunan angka kematian ibu dan anak, meningkatnya Pasangan Usia Subur yang ber KB dan

menurunnya angka kelahiran (Total fertility Rate) untuk menaikkan taraf hidup rakyat dan bangsa.

Program Keluarga Berencana ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 3.622.709.161,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.726.754.708,- dan tingkat realisasi mencapai angka 75,27%

1) Penunjang Kegiatan Pendataan Keluarga

Indikator kinerja kegiatan ini Jumlah peserta orientasi dengan target 225 Orang dan alokasi dana sebesar Rp. 86.760.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 84.424.855,- dengan tingkat realisasi keuangan 97,31% dan capaian realisasi fisik 100%.

2) Fasilitas Koalisi Kependudukan

Indikator kinerja kegiatan ini Tersedianya buku analisa Kependudukan dengan target 1 Dokumen dan alokasi dana sebesar Rp. 80.000.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 71.563.948,- dengan tingkat realisasi keuangan 89,45% dan capaian realisasi fisik 100%.

3) Sarasehan Hasil Pendataan Keluarga

Indikator kinerja kegiatan ini Sarasehan hasil dengan target 4 kegiatan dan alokasi dana sebesar Rp. 27.000.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 22.325.000,- dengan tingkat realisasi keuangan 82,68% dan capaian realisasi fisik 100%.

4) Sosialisasi/Grand Design Pengendalian Kualitas Penduduk

Indikator kinerja kegiatan ini Sosialisasi / Grand Design Pengendalian Kualitas Penduduk dengan target 130 orang dan alokasi dana sebesar Rp. 18.450.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 17.710.000,- dengan tingkat realisasi keuangan 95,99% dan capaian realisasi fisik 100%.

5) Orientasi Pencatatan dan Pelaporan Bagi Pengurus KB

Indikator kinerja kegiatan ini Jumlah Peserta orientasi pencatatan dan pelaporan dengan target 200 Orang dan alokasi dana sebesar Rp. 25.500.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 25.255.000,- dengan tingkat realisasi keuangan 99,04% dan capaian realisasi fisik 100%.

6) Orientasi Petugas Pendataan Keluarga

Indikator kinerja kegiatan ini Peserta orientasi petugas pendataan keluarga dengan target 200 Orang dan alokasi dana sebesar Rp. 25.400.000,- dan

dapat terealisasi sebesar Rp. 25.370.000,- dengan tingkat realisasi keuangan 99,88% dan capaian realisasi fisik 100%.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Anggaran yang tersedia dalam APBD Pemerintah Kota Bukittinggi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kota Bukittinggi adalah sebesar Rp. 11.569.056.872,- yang terdiri atas belanja tidak langsung Rp. 4.244.123.859,- dan belanja langsung sebesar Rp.7.324.933.013,- sedangkan dari sektor pendapatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak mempunyai target pendapatan.

Rincian aspek keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kota Bukittinggi dapat dilihat dalam tabel sbb:

No	URAIAN	ANGGARAN		
		JUMLAH(Rp)	REALISASI(Rp)	(%)
1.	Pendapatan	0	0	0
2.	Belanja	11.569.056.872,-	10.133.132.608,-	87,59
	- Tidak langsung	4.244.123.859,-	4.069.142.721,-	95,88
	- Langsung	7.324.933.013,-	6.063.989.887,-	82,79

Rincian Anggaran perprogram dan kegiatan dapat dilihat dari rincian di bawah ini :

NO		PROGRAM/KEGIATAN	DANA (ANGGRAAN) (Rp)		
			TERSEDIA	REALISASI	%
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	1.	Penyediaan jasa Surat menyurat	3.600.000	3.378.000	93,83
	2	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	40.000.000	26.139.625	65,35

	3.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dari perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional.	179.883.600	145.620.904	80,95
	4.	Penyediaan Jasa kebersihan kantor.	18.899.492	13.673.288	72,35
	5.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan kantor.	8.500.000	8.497.700	99,97
	6.	Penyediaan Alat Tulis kKantor	10.000.000	9.776.600	97,77
	7.	Penyediaan barang cetakan dan Pengadaan.	16.000.000	15.996.600	99,98
	8.	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan dan bangunan	2.393.900	2.375.000	99,21
	9.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000	1.499.953	99,99
	10.	Penyediaan makanan dan minuman	30.000.000	29.277.000	97,59
	11.	Rapat-rapat koordinasi,konsultasi,sosialisasi dan perjalanan dinas ke luar kota Bukittinggi	222.657.000	222.615.309	99,98
	12.	Penyediaan jasa pengawai non PNS	75.394.224	50.473.979	66,95
	13.	Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi kantor	1.250.000	1.125.000	90
	14.	Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah	20.000.000	19.295.000	96,47
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana				
	15	Pengadaan peralatan kantor	55.500.000	55.498.420	99,99
	16	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	30.000.000	0	0
III		Prog peningkatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur			
	17	Penilaian angka kredit Pejabat fungsional	14.122.150	13.900.150	98,43

IV	Program Peningkatan Pengembangan System Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
	18	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	2.367.400	2.302.500	97,26
	19	Penyusunan Pelaporan keuangan semesteran dan akhir tahun	1.034.700	1.034.700	100
	20	Penyusunan rencana kerja dan keuangan SKPD	1.458.900	1.458.900	100
	21	Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir Tahun	1.477.400	1.470.000	99,50
V	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan				
	22	Fasilitasi Penguatan Kota Layak Anak Melalui Pembentukan Kelurahan Ramah Anak	92.024.500	87.359.051	94,93
	23	Fasilitasi Pengembangan dan Perkuatan Forum Anak Daerah (Forda) dan Peringatan Hari Anak Nasional (HAN)	134.804.000	132.830.350	98,54
	24	Fasilitasi Pembentukan dan Perkuatan Lembaga Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPTPO)	30.000.000	27.770.000	92,57
	25	Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan tentang KDRT dan TPPO	13.850.000	13.136.000	94,84
VI	Program penguatan kelembangaan pengarusutamaan gender dan anak				
	26	Perkuatan dan Pengembangan P2TP2A	216.231.536	204.845.302	94,73
VII	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan				
	27	Penguatan Ekonomi Perempuan Rentan Melalui KIE Pelatihan, Pemberian Bantuan dan Pameran	131.010.000	129.340.926	98,73
	28	Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)	39.994.000	38.846.600	97,13

	29	Forum Koordinasi Penanganan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan, Eksploitasi dan Trafiking	45.000.000	41.635.471	92,52
VII I	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan				
	30	Fasilitasi dan Perkuatan Organisasi Perempuan	104.850.000	101.492.950	96,80
	31	Fasilitasi Peringatan Hari Ibu	98.100.000	93.643.200	95,46
	32	Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	1.700.080.550	1.493.348.301	87,84
	33	Penguatan dan Pengembangan Organisasi Mitra PUG dan PP	56.287.500	55.159.250	97,99
IX	Program Keluarga Berencana				
	34	Pelayanan KIE/Teknik Motivasi dan Konseling Program KB/KS	24.640.000	24.396.500	99,01
	35	Kancah Bhakti Saka Kencana	38.000.000	36.656.200	94,46
	36	Manunggal KB-KES	65.000.000	63.985.375	98,44
	37	Pelayanan KB Serentak dan Komplikasinya	35.735.000	33.592.500	94,004
	38	Pemberian Penghargaan KB Teladan	46.515.000	45.752.500	98,36
	39	Pengadaan sarana dan Prasarana Penyuluhan KB (DAK Fisik Bidang Kesehatan Keluarga Berencana 2017)	437.000.000	344.289.000	78,78
	40	Operasional Penyuluhan KB (DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB 2017)	289.800.000	275.525.950	95,07
	41	DAK Bidang Keluarga Berencana (Sisa DAK 2010 – 2015)	1.799.324.161	1.055.827.780	58,68
	42	Penunjang Operasional PPKBK dan Sub PPKBK serta Kader	283.673.000	277.715.000	97,90
	43	Penunjang Operasional Peserta KB, IUD, Implant dan Kader KB	30.000.000	24.650.000	82,17

	44	Penunjang Kegiatan Pendataan Keluarga	86.760.000	84.424.855	97,31
	45	Promosi Gelanggang Dagang Kelompok UPPKS	70.780.000	67.223.300	94,97
	46	Peringatan HARGANAS Kota, Provinsi dan Nasional	90.000.000	86.381.700	95,98
	47	Jambore Program KKBPK	54.132.000	51.744.950	95,59
	48	Fasilitasi Koalisi Kependudukan	80.000.000	71.563.948	89,45
	49	Fasilitasi Lapangan Program KKBPK	35.000.000	33.451.550	95,57
	50	Fasilitasi Kampung KB	60.000.000	58.913.600	98,19
	51	Sarasehan Hasil Pendataan Keluarga	27.000.000	22.325.000	82,68
	52	Sosialisasi/Grand Design Pengendalian Kualitas Penduduk	18.450.000	17.710.000	95,99
	53	Orientasi Pencatatan dan Pelaporan Bagi Pengurus KB	25.500.000	25.255.000	99,04
	54	Orientasi Petugas Pendataan Keluarga	25.400.000	25.370.000	99,88
X	Program Kesehatan Reproduksi Remaja				
	55.	Pelatihan KRR bagi Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya	39.990.000	39.990.000	100
	56.	Fasilitasi Program Generasi Berencana	95.840.000	92.157.750	96,16
	57.	Pelatihan KRR bagi Guru BK dan Kepala Sekolah terhadap Bahaya Narkoba, HIV/AIDS	41.263.000	41.263.000	100
	58	Penyelenggaraan Bimbingan Terpadu Program KKBPK	22.660.000	21.475.250	94,77
XI	Program Pelayanan Kontrasepsi				
	59	Penunjang Operasional Klinik KB	18.000.000	17.120.000	95,11
XII	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga				
	60	Fasilitasi dan Pelatihan Kader Poktan (BKB, BKR, BKL, UPPKS)	46.200.000	44.223.000	95,72
	61	Pembentukan dan Penandampingan Poktan	40.000.000	36.190.150	90,47

3.4 Permasalahan dalam Pencapaian Sasaran dan Rekomendasi Perbaikan

Untuk mengatasi hambatan-hambatan atau permasalahan dalam pencapaian target sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi maka upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada dalam setiap pelaksana kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi.
2. Mengajukan SPM lebih awal agar dilakukan percepatan-percepatan dalam pencairan anggaran yang tersedia untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kota Bukittinggi. Sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih awal untuk mengikuti jadwal yang telah di tetapkan .
3. Melakukan evaluasi setelah kegiatan terlaksana untuk melihat sejauh mana tingkat sasaran yang di capai oleh kegiatan yang telah dilakukan.

Kendala yang dihadapi

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pencapaian target yang telah ditetapkan untuk Tahun 2015 tidak ada hambatan dan kendala yang signifikan, namun tidak tercapainya seluruh target indikator kinerja sasaran sepenuhnya (100%) disebabkan terdapatnya beberapa hambatan dengan pokok-pokok permasalahan yang saling berkaitan,yaitu:

- Kesalahan dalam penempatan rekening anggaran
- Belum maksimalnya KIE
- Terbatasnya PLKB

Strategi pemecahan masalah

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi pada masa yang akan datang perlu strategi antara lain :

- Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada melalui pelatihan-pelatihan baik yang diadakan oleh Pemerintah Kota, Provinsi maupun Pemerintah Pusat sehingga setiap pegawai dan PPTK mengerti dan paham dengan sasaran yang hendak dicapai dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan.
- Pemanfaatan fasilitas kantor secara *efektif*, kegiatan yang tidak terlaksana < 70 % akan menjadi kajian dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun mendatang periksa lagi.
- Perlu Pengangkatan Pejabat Fungsional PLKB

3.5 USULAN DAN HARAPAN

Usulan dan harapan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pencapaian target Tahun 2018 agar berjalan efektif dan efisien yaitu :

- Agar betul-betul diperhatikan Renja awal SKPD yang merupakan penyusunan Program dan kegiatan yang prioritas bagi SKPD.
- Anggaran perubahan harus diakui ketersediaan waktu untuk merealisasikannya, artinya harus ada percepatan anggaran
- Melakukan evaluasi setelah kegiatan terlaksana untuk melihat sejauh mana tingkat sasaran yang di capai oleh kegiatan yang telah dilakukan.

3.6 PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki,

sehingga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi telah memperoleh penghargaan dan prestasi sebagai berikut :

Tabel 3.6.1

**Daftar Prestasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2017**

No	Tingkat Provinsi atau Nasional	Bidang/ Kategori	Prestasi yang Diraih	Nama/ Lembaga	Ket
1	Nasional	Kota Layak Anak	Pratama	Kementerian PPPA	Lomba Program KKBPK, BKR Flamboyan
2	Provinsi	Bina Keluarga Remaja	Juara II	Perwakilan BKKBN Prop.Sumbar	
3	Provinsi	Duta Genre	Juara II kategori Putra	Perwakilan BKKBN Prop.Sumbar	Azbar Lubis
	Provinsi	Ayah Bunda Genre Award	ABG Award kategori kreator	Perwakilan BKKBN Prop.Sumbar	Sumitri, S.Pd. Mbiomed
4	Provinsi	Ayah Bunda Genre Award	ABG Award kategori Pengayom	Perwakilan BKKBN Prop.Sumbar	Bapak Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias
5	Provinsi	Pasangan KB Lestari, 10, 15, 20 th	KB Lestari 15 th	Perwakilan BKKBN Prop.Sumbar	Yasrizal/Desmawati - Tarok Dipo

6	Provinsi	Lomba Pionering	Juara 3	Perwakilan BKKBN Prop.Sumbar	Ajang Temu Kreatifitas dan Kemah Bhakti Saka Kencana
7	Provinsi	Lomba Rangking 1 Genre	Juara 3	Perwakilan BKKBN Prop.Sumbar	
8	Provinsi	Lomba Fun Cooking Genre	Juara 2	Perwakilan BKKBN Prop.Sumbar	
9	Provinsi	Lomba Adventure	Juara 2	Perwakilan BKKBN Prop.Sumbar	
10	Provinsi	Dance Icon Genre	Juara 2	Perwakilan BKKBN Prop.Sumbar	
11	Provinsi	Lomba Pentas Seni	Juara 3	Perwakilan BKKBN Prop.Sumbar	
12	Provinsi	UPPKS	Juara 3	Perwakilan BKKBN Prop.Sumbar	Lomba Program KKBPK/UPPKS Makmur - Gulai Bancah
13	Provinsi	Kegiatan PKK KB Kes	Juara 1 Lomba PKK KB Kes	Perwakilan BKKBN Prop.Sumbar	Lomba Program KKBPK/UPPKS Makmur - Gulai Bancah

Gambar 3.6.1

.Pemberian Piala Kota Layak Anak oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak kepada Walikota Bukittinggi





BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi Tahun 2017. Laporan ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2017 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan (8) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017 yang ingin dicapai.

Dengan tersusunnya LKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bukittinggi

Bukittinggi, Februari 2018

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi,



TATI YASMARNI, SE MM
NIP. 19630629 198302 2001